



LAPORAN PENERAPAN **TATA KELOLA** PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN **2025**

PT. JAMKRIDA KALSEL (PERSERODA)



DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	TRANSPARASI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK.....	3
A.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS.....	3
1.	Jumlah, nama jabatan tanggal lulus, dan nomor fit and proper test, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	3
2.	Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	23
3.	Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	26
4.	Pelatihan direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.....	26
5.	Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.....	45
6.	Pelaksanaan tugas Komisaris Independen.....	69
7.	Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.....	70
B.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS.....	71
C.	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL.....	75
D.	PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO, SYSTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI.....	79
E.	PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEGAWAI.....	82
F.	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN.....	86
G.	RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN.....	87
H.	PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM.....	87
III.	PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM LEMBAGA PENJAMIN TEMPAT ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DIMAKSUD MENJABAT.....	88
IV.	PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINYA.....	89

I. PENDAHULUAN

PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (PT Jamkrida Kalsel) meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan fondasi utama untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif. Di tengah dinamika industri penjaminan yang penuh risiko, penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran (TARIF) menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.

Laporan GCG ini disusun sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap lini organisasi bergerak selaras dengan visi dan misi Perusahaan. Melalui implementasi yang konsisten, Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi Pemegang Saham serta memberikan perlindungan hak bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Laporan ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala guna merespons perubahan regulasi, perkembangan industri, serta praktik terbaik (*best practices*) tata kelola global, demi mewujudkan pola hubungan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan GCG

Penyusunan Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Jamkrida Kalsel memiliki maksud dan tujuan utama sebagai berikut:



1. Menyediakan kerangka kerja dan standar acuan baku bagi seluruh Organ Perusahaan dan karyawan dalam bersikap, bertindak, serta mengambil keputusan strategis guna memastikan seluruh aktivitas operasional selaras dengan nilai-nilai perusahaan.
2. Mengoptimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan melalui penerapan prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) untuk memperkuat struktur modal dan daya saing di tingkat nasional.
3. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional melalui penguatan fungsi *Check and Balances*, serta menjamin kemandirian masing-masing Organ Perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi) tanpa adanya intervensi yang tidak sesuai dengan peraturan.
4. Menanamkan kesadaran hukum dan etika bisnis yang tinggi untuk memastikan setiap tindakan manajemen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memitigasi risiko operasional dan reputasi.
5. Mewujudkan PT Jamkrida Kalsel sebagai institusi penjaminan yang sehat secara finansial, dapat diandalkan dalam pelayanan, amanah dalam mengelola dana publik, serta kompetitif dalam inovasi produk penjaminan.
6. Meningkatkan kontribusi nyata Perusahaan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan,

khususnya melalui penguatan akses pembiayaan bagi sektor UMKM dan Koperasi.

7. Mengatur arah hubungan antar-organ perusahaan serta memastikan terpenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagai bentuk komitmen terhadap masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Selatan.

II. TRANSPARASI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS

1. Jumlah, nama jabatan tanggal lulus, dan nomor fit and proper test, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

- Direksi

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarga negaraan	Domisili
1.	Muhammad Fauzan Noor, SE, ME	Direktur Utama	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. : KEP-67/KO.23/2025 tanggal 19 Desember 2025	Akta No. 10 tanggal 10 September 2025 Masa Jabatan 5 (Lima) Tahun (02-01-2026 s.d 02-01-2031) berdasarkan Surat Penetapan Gubernur Kalimantan Selatan No. 500/00145/Eko/2026 tanggal 22 Januari 2026	Indonesia	Banjarmasin
2.	Muhammad Hanafiah	Direktur Bisnis	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. : KEP-225/NB.02/2023 tanggal 22-05-2023	Akta No. 01 tanggal 16 Februari 2023 Masa Jabatan 5 (Lima) Tahun (22-05-2023 s.d 22-05-2028)	Indonesia	Banjarmasin

- Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.	Muhammad Syarifuddin	Komisaris Utama	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. : KEP-33/KO.23/2025 tanggal 08 Agustus 2025	Akta No. 10 tanggal 10 September 2025 Masa Jabatan 5 (Lima) Tahun (08-08-2025 s.d 08-08-2030).	Indonesia	Tapin
2.	Rudi Ansyari	Komisaris Independen	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. : KEP-68/KO.23/2025 tanggal 19 Desember 2025	Akta No. 10 tanggal 10 September 2025 Masa Jabatan 5 (Lima) Tahun (02-01-2026 s.d 02-01-2031) berdasarkan Surat Penetapan Gubernur Kalimantan Selatan No. 500/00145/Eko/2026 tanggal 22 Januari 2026	Indonesia	Banjarmasin

- Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.	Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. : KEP/106/NB.21/2021 tanggal 28-12-2021	Akta No. 09 tanggal 09 September 2021 Masa Jabatan 5 (Lima) Tahun (09-09-2021 s.d 09-09-2026).	Indonesia	Banjarmasin
2.	Akhmad, S.E.I	Dewan Pengawas Syariah	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. : KEP/53/NB.21/2022 tanggal 07-11-2022	Akta No. 47 tanggal 29 Maret 2022 Masa Jabatan 5 (Lima) Tahun (09-09-2021 s.d 09-09-2026).	Indonesia	Banjarmasin

Biodata Direksi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DIREKTUR UTAMA

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Fauzan Noor, SE, ME
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Kandangan, 01 Oktober 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Brigjend H. Hasan Basri
Komp. Meranti XI No. 12
Banjarmasin
Nomor Handphone : 081349789076
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono No. 31 RT. 004
RW. 001 Kel Kertak Baru Ilir
Banjarmasin 70111
Nomor Telepon Kantor : (0511) 6723930
Nomor KTP/ Paspors : 6371 0201 1072 0009
NPWP : 08.731.008.7-731.000
Status : Menikah
Agama : Islam

II. Riwayat Pendidikan Formal

NO	TAHUN	NAMA INSTITUSI	FAKULTAS /JURUSAN	LULUS/GELAR YANG DICAPAI
1	1983	SD Negeri Pekapuran Banjarmasin	-	-
2	1988	SMP Negeri 7 Banjarmasin	-	-
3	1991	SMA Negeri 3 Banjarmasin	Ilmu Sosial	-
4	1997	Universitas Lambung Mangkurat	Ekonomi &	SE

NO	TAHUN	NAMA INSTITUSI	FAKULTAS /JURUSAN	LULUS/GELAR YANG DICAPAI
		Banjarmasin	Pembangunan	
5	2008	Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Magister Ekonomi Pembangunan	ME

III. Riwayat Pekerjaan

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
11 Maret 1997 – 25 September 1997	Bank Bukopin	Trainee
19 Februari 1998 – 30 September 2004	Bank Indonesia Banjarmasin	Micro Credit Project Officer
01 Oktober 2004	Bank Kalsel	Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Lembaga Usaha Kecil – Divisi Perencanaan
10 Maret 2009	Bank Kalsel	Pemimpin Divisi – Divisi Perencanaan & Strategi
07 Desember 2017	Bank Kalsel	Kepala Cabang Rantau
02 Januari 2019	Bank Kalsel	Kepala Cabang Banjarbaru
08 April 2019	Bank Kalsel	Strategy & Performance Projects Center of Excellence
04 April 2022	Bank Kalsel	B2B Program & Apex Divisi Usaha Mikro Kecil
04 Desember 2023	Bank Kalsel	Kepala Bagian B2B Konsumer Divisi Konsumer
14 Oktober 2025	Bank Kalsel	Kepala Cabang Marabahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DIREKTUR BISNIS

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Hanafiah S.E
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Kandangan, 28 Oktober 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Pramuka Komp. DPRD No. 9 RT.
19
Kota Banjarmasin Provinsi
Kalimantan Selatan
Nomor Handphone : 0811501653
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono No. 31 RT. 004 RW.
001 Kel Kertak Baru Ilir Banjarmasin
70111
Nomor Telepon Kantor / HP : (0511) 6723930 / 08125185508
Nomor KTP/ Paspor : 6371 0228 1067 0002
NPWP : 083660423731000
Status : Menikah
Agama : Islam

II. Riwayat Pendidikan Formal

No	TAHUN	NAMA INSTITUSI	Jurusan/Program	Lulus/Gelar Yang Dicapai
1.	1975	SD Negeri Bakti Sungai Raya		-
2	1981	SMP Negeri 2 Kandangan		-
3	1984	SMA Negeri 1 Kandangan	IPA	-
4	1988	Universitas Lambung Mangkurat	Ekonomi	SE

III. Riwayat Pekerjaan

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
2021-2023	Bank Kalsel Pelaihari	Kepala Cabang
2019-2021	Bank Kalsel Pelaihari	Remedial & Collection Project Center Of Excellence
2019	Bank Kalsel Pelaihari	Staf Profesional Staff Tim Kredit dan Pembiayaan Bermasalah
2018-2019	Bank Kalsel Batulicin	Pemimpin KC Kelas 1 (Konvensional/Syariah)
2017-2018	Bank Kalsel Batulicin	Pemimpin KC Kelas II (Konvensional/Syariah)
2015-2017	Bank Kalsel Kandangan	Pemimpin KC Kelas III (Konvensional/Syariah)
2011-2015	Bank Kalsel Pembantu RSUD ULIN BANJARMASIN	Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (Konvensional/Syariah)
2010-2011	Bank Kalsel Cabang Utama	Pemimpin BPD Unit Kantor Cabang Utama BPD Unit
2009-2010	Bank Kalsel Cabang Utama	Pemimpin Seksi KCU BPD Unit
2006-2009	Bank Kalsel Cabang Utama	Pemimpin BPD Unit/Kantor Kas (ASS2 S/DSAS2)
2006-2006	Bank Kalsel Martapura	Staf Sub Devisi Sekretariat dan Humas
2003-2006	Bank kalsel Martapura	Staf Devisi Umum dan Logistik
2002-2003	Bank Kalsel Martapura	Pemimpin Seksi KC Kelas I Seksi Pemasaran dan Analisa Kredit
2002-2002	Bank Kalsel Martapura	Staf Sub Devisi Administrasi dan Supervisi Kredit
2001-2002	Bank Kalsel Cabang Utama	Pemimpin Seksi KCU Seksi Administrasi dan Pelaporan Kredit
2000-2001	Bank Kalsel Kotabaru	Pemimpin Seksi KC Kelas I Seksi Pemasaran

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
1998-2000	Bank Kalsel Cabang Utama	Staf Sub Divisi Analisa Pengembangan Kredit
1995-1998	Bank Kalsel Cabang Utama	Staf Seksi Pemasaran dan Analisa Kredit
1995-1995	Bank Kalsel Cabang Utama	Staf Sub Divisi Analisa Pengembangan Dana Jasa

Biodata Dewan Komisaris

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KOMISARIS UTAMA

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Syarifuddin, M. Pd
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Oktober 1967
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat Rumah : Jl. Pahlawan No. 9 RT. 002 RW. 001
 Kelurahan Rantau Kanan
 Kec. Tapin Utara Kabupaten Tapin
 Nomor Handphone : 081251284923
 Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono No. 31 RT. 004 RW.
 001 Kel Kertak Baru Ilir Banjarmasin
 70111
 Nomor Telepon Kantor : (0511) 6723930
 Nomor KTP/ Paspor : 630504310670001
 NPWP : 155420003733000
 Status : Menikah
 Agama : Islam

II. Riwayat Pendidikan Formal

No	TAHUN	NAMA INSTITUSI	Jurusan/Program	Lulus/Gelar Yang Dicapai
1.	1980	SD Negeri Kesumagiri Rantau	-	-
2.	1983	SMP Negeri 1 Rantau	-	-
3.	1986	SMA Negeri 1 Rantau	IPS	-
4.	1993	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Pendidikan Sejarah	S.Pd
5.	2003	Universitas Negeri Yogyakarta	Pendidikan dan Pengetahuan Sosial	M. Pd

III. Riwayat Pekerjaan

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
1994	Pemerintahan	Calon Pegawai Negeri Sipil
1996	Pemerintahan	Pegawai Negeri Sipil
2008	Pemerintahan	Kepala Seksi Pembelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2011	Pemerintahan	Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2013	Pemerintahan	Kepala Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat DPRD Kab. Tapin
2015	Pemerintahan	Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kab. Tapin
2016	Pemerintahan	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Tapin
2017	Pemerintahan	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tapin
2017	Pemerintahan	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tapin
2020	Pemerintahan	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
2020	Pemerintahan	Penjabat Bupati Kotabaru
2021	Pemerintahan	Penjabat Bupati Kotabaru
2023	Pemerintahan	Penjabat Bupati Tapin
2025	Pemerintahan	Penjabat Bupati Tapin
2025	Pemerintahan	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP KOMISARIS INDEPENDEN

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Rudi Ansyari, IR, MM
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 September 1968
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat Rumah : Jl. Pramuka Komp. Rahayu-Pembina
 IV Blok C No. 02 Kelurahan Sungai
 Lulut Kecamatan Banjarmasin
 Timur, Kota Banjarmasin
 Provinsi Kalimantan Selatan
 Nomor Handphone : 0811503777
 Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono No. 31 RT. 004 RW.
 001 Kel Kertak Baru Ilir Banjarmasin
 70111
 Nomor Telepon Kantor : (0511) 6723930
 Nomor KTP/ Paspor : 6371021409680007
 NPWP : 08.370.943.6- 731.000
 Status : Menikah
 Agama : Islam

II. Riwayat Pendidikan Formal

NO	TAHUN	NAMA INSTITUSI	FAKULTAS /JURUSAN	Lulus/Gelar Yang Dicapai
1.	1981	SD Muhammadiyah Banjarmasin	-	-
2.	1984	SMP Negeri 7 Banjarmasin	-	-
3.	1987	SMA Negeri 2 Banjarmasin	A.2 Biologi	-
4.	1996	Institut Teknologi Indonesia - Jakarta	Teknik Industri	S1
5.	1998	Sekolah Tinggi Manajemen LABORA – Jakarta	Manajemen	MM

III. Riwayat Pekerjaan

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
1994 – 1995	PT. Fajar Sun Master (Cosmos Group)	Supervisor
1996	PT. Multi Persada Gatra Megah	Staf Keuangan
1996 – 1999	Bank Utama / Bank Pesona (Humpus Group)	Reviewer
1999 – 2001	Nobel Paten Office	Head of Intellectual Propety Bureau
2001 – 2003	Bankir Indonesia Consultan	Senior Manager
2005 – 2007	Bank Kalsel	Ketua Tim SKMR
2007 – 2009	Bank Kalsel	Ka. Sub Divisi Manaj. Risiko
2009 – 2010	Bank Kalsel	Plt. Kepala Cab. Tanjung
2010 – 2015	Bank Kalsel	Ka. Sub Divisi Perencanaan & Riset
2015 – 2017	Bank Kalsel	Kepala Cab. Rantau
2017 – 2019	Bank Kalsel	Kepala Divisi Perencanaan & Strategi
2019	Bank Kalsel	Penugasan Kepala Cab. Bjr Baru

2019	Bank Kalsel	Penugasan Kepala Cab. Jakarta
2019 – 2023	Bank Kalsel	Kepala Divisi Jaringan Pelayanan Cabang
2023 – 2025	Bank Kalsel	Kepala Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan

Uraian susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum pada tabel diatas telah disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa dan di cantumkan pada Akta Notaris No 16 tanggal 15 Februari 2023.

Biodata Dewan Pengawas Syariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah,
S.Ag., S.H., M.Hum.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Nopember 1976

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Rumah : Jl. Pramuka Km.6 No.20 Rt.5
Banjarmasin

Nomor Handphone : 0813-4843-9997

Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono No. 31 RT. 004 RW.
001 Kel Kertak Baru Ilir Banjarmasin
70111

Nomor Telepon Kantor : (0511) 6723930

Nomor KTP/ Paspor : 6371020911760001

NPWP : 14.073.831.1-731.000

Status : Menikah

Agama : Islam

II. Riwayat Pendidikan Formal

TINGKATAN	TAHUN	NAMA INSTITUSI	FAKULTAS /JURUSAN	Lulus/Gelar Yang Dicapai
S1	1996	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	Ahwal Al- Syakhshiyah (Syariah)	S.Ag
S1	1996	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)	S.H
S2	2001	Universitas Gajah Mada	Hukum Bisnis	M.H
S3	2003	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi)	Dr

III. Riwayat Pekerjaan

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
2007-2009	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ketua Academic Center Fakultas Hukum Unlam	Academic Center Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, adalah lembaga di bawah Fakultas dalam pengembangan keilmuan Hukum, yang melaksanakan berbagai kegiatan ke arah pengembangan dalam bidang: 1) Pengembangan pendidikan dan pengajaran; 2) Pengembangan penelitian; 3) Pengembangan pengabdian kepada masyarakat; Pengembangan perencanaan dan kerjasama.
2008-2011	Universitas Lambung Mangkurat Kabid Akademik Magister Kenotariatan FH Unlam	Universitas Lambung Mangkurat, yang berada di bawah Fakultas Hukum, dalam unsur pelaksana di bidang akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua MKn dan Dekan Fakultas Hukum

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
		Universitas Lambung Mangkurat. Bagian ini mempunyai tugas memberikan layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan di Magister Kenotariatan FH ULM.
2011-2014	Universitas Lambung Mangkurat Ketua UPT P3AI Universitas Lambung Mangkurat	UPT P3AI Universitas Lambung Mangkurat, adalah UPT yang membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dalam pengambilan kebijakan akademik. Kebijakan akademik ini untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran yang mencakup kegiatan pengembangan metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar, penataan dan pengembangan regulasi proses akademik yang lebih terukur dan pengembangan kurikulum sesuai tuntutan stakeholder. Kebijakan dan memantau Proses pembelajaran, jumlah standar peraturan akademik, jumlah prodi yang sudah mengadopsi kurikulum metode pembelajaran terbaru.
2014-2015	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin Ketua	Di Luar Universitas Lambung Mangkurat. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin ini menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. STIH Sultan Adam

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
		menyelenggarakan pendidikan akademik, meliputi program pendidikan sarjana, dan Magister Hukum, menyelenggarakan penelitian yang dipublikasikan melalui forum ilmiah dan/atau jurnal ilmiah nasional atau internasional yang diakui Kementerian. STIH juga Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan dan / atau non kependidikan.
2015-2018	Universitas Lambung Mangkurat Sekretaris LPPM Unlam	Lembaga merupakan unit pelaksana akademik di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Sekretaris LPPM Membantu Ketua LPPM dan Wakil Rektor Bidang Akademik dalam Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. LPPM mengarahkan universitas untuk menjadi research university sehingga hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat universitas juga merupakan ukuran keberhasilan sebuah universitas. Kondisi saat ini menuntut universitas menurunkan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan jumlah dan

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
		mutu publikasi ilmiah dosen dan HKI, peningkatan kapasitas pengelolaan jurnal/publikasi ilmiah, penemuan produk unggulan dan pengembangan alih teknologi, peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2017-Sekarang	Universitas Lambung Mangkurat Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Senat fakultas menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik di lingkungan fakultas. Ketentuan lebih lanjut mengenai senat fakultas diatur dengan Peraturan Senat Fakultas.
2018-Sekarang	Universitas Lambung Mangkurat Anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat	Senat fakultas menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik di lingkungan fakultas. Ketentuan lebih lanjut mengenai senat fakultas diatur dengan Peraturan Senat Fakultas.
2018-Sekarang	Universitas Lambung Mangkurat Dekan Fakultas Hukum	Dekan adalah pimpinan yang dalam ruang lingkup Fakultas yang bertanggung jawab kepada Rektor. Dekan FH ULM mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengelola sumberdaya, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DEWAN PENGAWAS SYARIAH

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Akhmad, S.E.I., M.H.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Gambut, 30 Januari 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Setia Bersama KM. 12.900 RT.
005
RW. 002 Kelurahan Gambut Barat,
Kecamatan Gambut, Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan
Nomor Handphone : 0852 4851 7786
Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono No. 31 RT. 004 RW.
001 Kel Kertak Baru Ilir Banjarmasin
70111
Nomor Telepon Kantor : (0511) 6723930
Nomor KTP/ Paspor : 6303033006890001
NPWP : 16.732.959.8.732.000
Status : Menikah
Agama : Islam

II. Riwayat Pendidikan Formal

TINGKATAN	TAHUN	NAMA INSTITUSI	FAKULTAS /JURUSAN	Lulus/Gelar Yang Dicapai
S2	2014 – 2019	UIN Antasari Banjarmasin	Hukum Ekonomi Syariah	S2 / MH
S1	2011 – 2012	Universitas Achmad Yani	Administrasi Keguruan	Akta IV

TINGKATAN	TAHUN	NAMA INSTITUSI	FAKULTAS /JURUSAN	Lulus/Gelar Yang Dicapai
S1	2007 – 2011	IAIN Antasari Banjarmasin	Ekonomi Islam	S1/ S.E.I
SMA	2004 – 2007	MAN 1 Martapura	Ilmu Pegetahuan Alam	-
SMP	2001 – 2004	MTsN 2 Gambut	-	-
SD	1995 - 2001	SDN Gambut 3	-	-

III. Riwayat Pekerjaan

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
2020 – 2022	PT. Citra Tirta Mulia (2020 – 2022)	Sebagai marketing, Job Disk antara lain: - Memasarkan produk pembiayaan - Mapping calon end user - Maintenance end user baru dan lama - Mensosialisasikan produk ke Institusi, Dinas, Pasar dan sebagainya - Melakukan analisa terhadap calon end user pembiayaan - Membuat laporan pemasaran - Dan lain sebagainya Sebagai Kepala Cabang/ Branch Manager KP Banjarmasin, Job Disk antara lain: - Mengarahkan dan mengawasi job disk pada setiap bagian/seksi terlaksana dengan baik - Membuat strategi umum untuk pencapaian kinerja maksimal pada setiap bagian/seksi - Membina hubungan dengan calon end user - Melakukan penilaian kinerja untuk setiap bagian/seksi Dan lain sebagainya
2019 – 2022	Institut Agama Islam	Dosen Luar Biasa/ Tidak Tetap untuk

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
	Darussalam Martapura (2019 – 2022)	mata kuliah: - Produk dana dan jasa bank syariah - Organisasi bank dan kepemimpinan - Operasional bank syariah Audit dan Pengawasn Syariah
2019 – 2020	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2019 – 2020)	Dosen Luar Biasa/ Tidak Tetap untuk mata kuliah: - Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ushul Fiqh Keuangan Syariah
2019	Panitia Pengawas Pemilu (2019)	Sebagai personel Divisi Penindakan Hukum - Mengawasi penerapan kepatuhan hukum dalam pemilu - Melaporkan setiap pelanggaran pemilu - Melakukan upaya penyelesaian pelanggaran - Survey dan sosialisasi ke setiap desa Dan lain sebagainya.
2019	Asuransi Takaful Keluarga (2019)	Sebagai A-TSM (Associate Takaful Sales Manager), Job Disk antara lain: - Merekrut dan membina jaringan agen asuransi - Melakukan pemasaran produk asuransi syariah - Melakukan pelaporan dalam upaya rekrut dan pembinaan jaringan agen - Melakukan pelaporan pemasaran produk asuransi, Dan lain sebagainya
2016 – 2018	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel Syariah) (2016 – 2018)	Sebagai Account Officer di beberapa cabang serta pernah menjadi karyawan pada Divisi Unit Usaha Syariah, Job Disk antara lain: - Memasarkan produk funding dan lending serta jasa dari Bank Kalsel Syariah - Mapping calon nasabah

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
		- Maintenance nasabah baru dan lama - Mensosialisasikan produk Bank Kalsel Syariah ke Sekolah, Institusi, Dinas, Pasar dan sebagainya - Melakukan analisa keuangan dan agunan terhadap calon nasabah pembiayaan - Melakukan pendekatan dan penagihan kepada nasabah macet - Melakukan analisa lanjutan untuk pembiayaan corporate yang limit pembiayaan berada diatas maksimal kewenangan cabang (Divisi UUS) - Melakukan pengarahan dan koordinasi kepada cabang-cabang terkait pencapaian target pembiayaan (Divisi UUS) Dan lain sebagainya
2012 – 2016	Badan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah - PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) (2012 – 2016)	Sebagai Amil ZIS, Job Disk antara lain: - Mengagendakan surat masuk dan keluar - Mencari mustahiq zakat yang berhak menerima bantuan - Membuat pertimbangan tentang kelayakan penerima bantuan dana ZIS - Menyalurkan secara langsung dana ZIS kepada mustahiq zakat - Membuat laporan bulanan dan tahunan terkait penerimaan dan penyaluran dana ZIS - Melakukan sosialisasi tentang zakat, infaq dan shadaqah.

Tahun	Organisasi/Perusahaan	Jabatan
		Dan lain sebagainya
2012 – 2016	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) (2012 – 2016)	Sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Syariah, Job Disk antara lain: - Mengagendakan dan mendokumentasikan rapat DPS dengan pejabat bank - Mengadministrasikan surat masuk, keluar dsb. - Melakukan audit periodik terkait penerapan prinsip syariah ke setiap cabang Bank Kalsel Syariah - Membuat resume hasil temuan dan persiapan exit meeting - Membuat laporan semester untuk diserahkan ke Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya - Melakukan sosialisasi tentang kebaikan bank syariah ke berbagai daerah/ Kabupaten - Membuat resume analisa tentang telaah terhadap SOP, produk baru dan permasalahan Dan lain sebagainya
2011	Taman Pendidikan Al-Qur'an Miftahul Khair, Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan (2011)	Sebagai Tenaga Pengajar, Job Disk antara lain: - Melakukan pengajaran materi iqro - Melakukan pengawasan pembelajaran pembacaan Al-Qur'an (tajwid, makharijul huruf, dan lain-lain) - Membuat tugas hafalan surat, pencarian hukum bacaan Dan lain sebagainya

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya adalah sebagai berikut :

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

- Tugas dan tanggung jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan sebagai berikut:

Direktur Utama :

Fungsi Utama: *Kepemimpinan Strategis, Pengawasan Makro, dan Kepatuhan.*

- Mengkoordinasikan perumusan, menetapkan, dan mengawal implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) secara terintegrasi.
- Mengambil tindakan dan kebijakan mendesak yang diperlukan untuk memastikan tercapainya target korporasi serta menjaga stabilitas finansial Perusahaan.
- Mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya guna memastikan sinergi antar-direktorat.
- Membawahkan fungsi Kepatuhan (*Compliance*) dan Audit Internal untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, regulasi OJK, dan prinsip GCG.
- Bertindak sebagai representasi utama Perusahaan dalam menjalin hubungan strategis dengan Pemegang Saham (Pemerintah Daerah), otoritas pengawas, mitra perbankan, dan pemangku kepentingan utama lainnya

Direktur Bisnis :

Fungsi Utama: *Eksansi Pasar, Akseptasi Risiko Penjaminan, dan Pengendalian Portofolio.*

- Merumuskan dan melaksanakan strategi pemasaran serta pengembangan produk penjaminan yang inovatif dan kompetitif untuk meningkatkan pangsa pasar.
- Mengarahkan dan mengawasi siklus penjaminan kredit yang meliputi proses akseptasi, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat penjaminan secara akurat.
- Mengelola dan memitigasi risiko atas portofolio penjaminan (NPL/Non-Performing Loan) serta memastikan rasio klaim tetap berada dalam batas aman yang ditetapkan.
- Melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja subrogasi dan pemulihan aset untuk menjaga tingkat solvabilitas Perusahaan.

- Membina hubungan produktif dengan mitra penerima jaminan (Bank/Non-Bank) guna memastikan kualitas *underwriting* yang sehat.

Direktur Operasional :

Fungsi Utama: *Manajemen Sumber Daya, Optimalisasi Keuangan, dan Transformasi Digital.*

- Merumuskan kebijakan manajemen keuangan, akuntansi, dan strategi investasi aset yang aman serta menguntungkan bagi likuiditas Perusahaan.
- Mengelola perencanaan, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia untuk menciptakan tenaga kerja yang profesional dan berintegritas tinggi.
- Memimpin pengembangan dan pengamanan sistem TI guna mendukung digitalisasi proses penjaminan, pelaporan yang *real-time*, dan efisiensi operasional.
- Mengkoordinasikan fungsi sekretariat, pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan aset tetap (logistik) Perusahaan agar berjalan secara efektif dan efisien.
- Memastikan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Operasional dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

- Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Komisaris Utama :

Fungsi Utama: *Kepemimpinan Pengawasan dan Hubungan Pemegang Saham.*

- Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan/rekomendasi atas Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan oleh Direksi.
- Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan Perusahaan serta kinerja Anggota Direksi secara periodik.
- Melakukan pemeriksaan mendalam atas Laporan Tahunan serta memberikan catatan evaluasi sebelum disahkan dalam RUPS.
- Melaksanakan pemanggilan dan memastikan penyelenggaraan RUPS (Tahunan maupun Luar Biasa) berjalan sesuai tata tertib dan peraturan perundang-undangan.
- Memastikan Perusahaan memiliki sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai guna mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

Komisaris Independen :

Fungsi Utama: *Penjaga Independensi, Pengawasan Audit, dan Perlindungan*

Stakeholders.

- Memimpin Komite Audit dalam menjalankan fungsi penelaahan atas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi di Lembaga Penjaminan.
- Memastikan adanya mekanisme *check and balances* dalam pengambilan keputusan Direksi guna melindungi kepentingan Pemegang Saham Minoritas, Terjamin, Penerima Jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Memberikan opini atau penilaian Independen terhadap kebijakan operasional Perusahaan, terutama yang memiliki potensi benturan kepentingan atau risiko material.
- Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan operasional perusahaan (jika memiliki Unit Syariah) senantiasa selaras dengan prinsip syariah.
- Memantau pelaksanaan audit internal dan eksternal serta menindaklanjuti temuan-temuan audit guna perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

- Tugas dan tanggung jawab DPS

Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah

- a. Memberikan nasihat, saran, dan masukan strategis kepada Direksi mengenai pengembangan produk, skema penjaminan, serta kebijakan operasional agar senantiasa selaras dengan prinsip syariah.
- b. Mengawasi secara berkala aspek syariah dalam kegiatan penghimpunan dana (investasi) dan penyaluran penjaminan, guna memastikan tidak adanya unsur yang dilarang (*Riba, Gharar, Maysir, Zalim*).
- c. Melakukan pengkajian dan memberikan opini atau pengesahan (*sharia approval*) atas Laporan operasional dan produk baru yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebelum diluncurkan ke pasar.
- d. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Syariah secara berkala yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham dan OJK.
- e. Menjadi komunikator utama antara Perusahaan dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rangka permohonan fatwa atau konsultasi terkait praktik keuangan syariah yang belum diatur secara spesifik.
- f. Mendorong internalisasi nilai-nilai dan etika bisnis syariah bagi seluruh insan PT Jamkrida Kalsel guna memperkuat integritas dan marwah perusahaan sebagai lembaga penjaminan amanah.

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Sejak menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris sampai saat ini tidak ada rangkap jabatan.

4. Pelatihan direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
1.	Muhammad Fauzan Noor	Pelatihan Program Sertifikasi Skema Direktur Investasi	2025	BCG
		Program Pengembangan Branch Manager Program Pemimpin Cabang Angkatan 205	2025	LPPI
		Benchmarking Program Pengembangan Branch Manager Program Pemimpin Cabang Angkatan 205	2025	LPPI
		Kegiatan Literasi Dan Inklusi Keuangan	2025	PT Sucorinvest Asset Management
		Prinsip Dasar Manajemen Kas Dan Perhitungan Limit Kas Kantor Cabang Untuk Pencegahan Terjadinya Fraud	2025	PT. Sanadi Corp Indonesia
		Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	2025	LSPP
		Strategi Pengembangan Ekosistem Digital	2025	Badan Penelitian & Pengembangan

			Daerah Jawa Barat
	Sertifikasi Level Credit Officer	2022	LSPP
	Workshop Microfinancing	2022	O.S Krislayanto
	Workshop Microfinancing Kajian Kertas Kerja Kredit UMKM	2022	O.S Krislayanto
	Inspiring Leadership and Develop Excellent Execution Culture	2020	Savira Anika Kreatif
	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	2019	LSPP
	Sistem Manajemen Terintegrasi (Strategi, Kinerja, Risiko dan Proses) : Konsep, Tools dan Implementasi	2019	AGI
	Strategy & Management Office	2019	PT.GML Performance Consulting
	Corporate Secretary Training Mempertajam Fungsi Corporate Secretary & Meningkatkan Value dan Reputasi Melalui Instrumen yang Ideal	2016	Risk Management Guard
	Evaluasi Pencapaian Program Transformasi BPD dalam Kerangka : Penyusunan Rencana Bisnis Bank, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	2016	Leinad Aganis
	OECD High Level Regional Seminar on Empowering MSMEs	2016	Otoritas Jasa Keuangan

	Through Financial Literacy and Inclusion		
	Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2016	2016	Risk Management Guard
	Analisa Beban Kerja & Perhitungan Kebutuhan Pegawai	2016	Aplikasi Sistem Bisnis (ASB)
	8 Test Of Organization Structure Effectiveness	2015	PT.GML Performance Consulting
	Organization Assesment & Execution Capability Audit	2015	PT.GML Performance Consulting
	7 Strategic Tools In Strategic Formulation	2015	PT.GML Performance Consulting
	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4	2014	LSPP
	Strategy & Initiative Management Office (SIMO)	2012	PT.GML Performance Consulting
	Balanced Scorecard Master Class Training	2010	PT.GML Performance Consulting
	Communication & Public Speaking National Summit 2010	2010	James Gwee
	Strategi Meningkatkan Laba dan Daya Saing Bank Melalui Pelayanan Prima	2010	Infobank
	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat II	2009	BSMR
	Strategi Business Plan Bank Pembangunan Daerah Tahun 2010	2009	Risk Management Guard

2.	Muhammad Hanafiah	Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah & Fatwa DSN MUI	2024	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
		Training Motivasi Pegawai (Divine Sound Empowerment Menuju Pencapaian Target)	2023	Jamkrida Kalsel
		Pelatihan Untuk Program Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Direktur Bisnis Penjaminan	2023	Bintang Cahaya Gempita
		Technical Skill Audit (Internal) Sosialisasi Anti-Fraud Awareness	19 Juli 2022	Internal bank (divisi internal audit)
		Technical Skill Manajemen Resiko (Internal) In House Training (IHT) Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	14-15 Juli 2022	Abah synergy
		Technical Skill Apekreditasi/Tresuri (Internal) Pelatihan Ready Cash Digital	27 Mei 2022	Internal bank (divisi konsumen)
		Sosialisasi UPZ Bank Kalsel	24 Mei 2022	Internal bank (upz bank kalsel)
		Sosialisasi Penggunaan Nota Dinas Elektronik	18 Mei 2022	Internal bank (divisi teknologi sistem informasi)
		Pelatihan Sustainable Finance (Praktik Keuangan	20 Desember 2021	Risiko manajemen gagasan

	Berkelanjutan)-Bach1		(rmg)
	Webinar Integritas Anti Korupsi & Gratifikasi	10 Desember 2021	Asep chaerullah. At, mm, cphr, crm, cit, cht
	Pelatihan APU & PPT Matero Pendalaman Identifikasi, Verifikasi, dan Pemantauan Dalam Implementasi Program APU & PPT di Bank Kalsel Teknik Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan	26 November 2021	Agr project pemateri dimas kenn syahrir
	Pelatihan APU & PPT Materi Penerapan APU & PPT Terhadap Nasabah (KYC, CDD & EDD) di Bank KalselRan UKK cabang Dalam Implementasi Program APU & PPT	25 November 2021	Agr project pemateri aryo seno/hilda nanda priyatna/tim
	Paper project Branch Manager Course	21 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Managing Sales Team	19 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Managing Stakeholder	18 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Managing People	18 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Negotiation Skill	15 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Communication Skill	15 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager	13	PT. Optima

	Program-Managing Costumer Experience	Oktober 2021	Daya Prima
	Branch Manager Program-Operational Risk	8 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Colaborative Selling	8 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Fraud Prevention Detection & Investagion	7 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Strategy Analysis & Formulation	7 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Branch Financial Statement Anlysis	6 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Strategi Pengembangan Kredit	5 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Branch Manager Program-Strategi Pengembangan Dana	5 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Sharing Project Paper Branch Manager	4 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Top Management Sharing Session	4 Oktober 2021	PT. Optima Daya Prima
	Sosialisasi Rencana Bisnis Bank 2021-2023 (Batch 1)	7 September 2021	PT. Optima Daya Prima
	E-Learning Presentasi Skill	28 Agustus 2021	PT. Optima Daya Prima
	Sosialisasi Core Banking System Temenos T24 KC Pelaihari, KCP Tala, KCP bati-Bati, KCP Takisung & KCP Asam-asam	29-30 Juni 2021	Internal bank (tiim cbs)

	Sosialisasi Terkait Edukasi COVID_19	20 April 2021	Dinas kesehatan kota banjarmasin
	Program Pemeliharaan (refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko	9 September 2020	Efektifpro knowledge source
	Business Strategy Brainstorming and Development Phase 3	24-25 Oktober 2019	Indonesia institute of management
	Business Development Brainstorming	1-2 Agustus 2019	Susanto onie
	Challenges In Indonesian Banking Industry Today-NPL & Business Developm	17 Juli 2019	Susanto onie
	Pelatihan Persiapan Program Pra Purnabakti Tahun 2019	22-26 April 2019	Miraj harmoni sukses
	Pelatihan APU PPT	6 Februari 2019	Hendro soeprijatno
	Sosialisasi Ketentuan Baru	18 Januari 2019	Bank kalsel-perencanaan
	Refresh Manajemen Risiko	7 Januari 2019	Lspp
	Anti Fraud	7 Maret 2017	(Ojk) otoritas jasa keuangan
	Anti Fraud	9 Maret 2017	(Ojk) otoritas jasa keuangan
	APU & PPT	10 Maret 2017	Bank kalsel-divisi sdm
	Ketentuan Internal Bank	22 April 2017	Bank kalsel-divisi sdm
	Penanganan Kredit Bermasalah	5 Mei 2017	Bank kalsel-divisi sdm
	Penanganan Kredit Bermasalah	8 Juli 2017	Pt. Optima daya prima
	Refresh Sertifikasi	12 Agustus	Lspp

	Manajemen Risiko	2017	
	PMK No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Lelang	11 Agustus 2016	Bank kalsel- divisi sdm
	SP2D Online	21 Juni 2016	Bank kalsel- divisi sdm
	Motivasi	28 Mei 2016	Bank kalsel- divisi sdm
	PMK RI No.235/PMK.07/2015	12 Februari 2016	Bank kalsel- divisi sdm
	Penanganan Kredit Bermasalah	6-8 Mei 2015	Bank kalsel- divisi sdm
	Leadership	20 Mei 2015	Achievement consulting
	Pembekalan Sertifikasi Profesi Perbankan	14-15 September 2015	Bank kalsel- divisi sdm
	BP/Ketentuan Divisi Umum	18 September 2015	Bank kalsel- divisi sdm
	Pembekalan Sertifikasi Profesi Perbankan	25 September 2015	Bank kalsel- divisi sdm
	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 3	26 September 2015	Lspp
	BP/Ketentuan Divisi Dana Jasa	28 September 2015	Bank kalsel- divisi sdm
	BP/Ketentuan Divisi Dana Jasa	9 November 2015	Bank kalsel- divisi sdm
	Penanganan Kredit Bermasalah	10 Desember 2015	Bank kalsel- divisi sdm
	BP/Ketentuan Divisi Jaringan & Pelayanan Cabang	2 September 2014	Bank kalsel- divisi sdm
	Motivasi	23-26 Agustus	Bank kalsel- divisi sdm

		2014	
Aspek Hukum Perkreditan	11-13 Agustus 2014	Bank kalsel-divisi sdm	
LED & PRC	13 Desember 2013	Bank kalsel-divisi sdm	
BP/Ketentuan Divisi Dana Jasa	4 November 2013	Bank kalsel-divisi sdm	
Service Quality	19 Agustus 2013	Bank kalsel-divisi sdm	
Budaya Perusahaan	19 Agustus 2013	Bank kalsel-divisi sdm	
Asset Liability Management (ALMA)	5-6 Juli 2013	Bank kalsel-divisi sdm	
BP/Ketentuan Divisi Dana Jasa	18 Maret 2013	Bank kalsel-divisi sdm	
Anti Fraud	22 januari 2013	Bank kalsel-divisi sdm	
Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2	24 November 2012	Lspp	
Pembekalan Serifikasi Profesi Perbankan	22 November 2012	Bank kalsel-divisi sdm	
Pembekalan Serifikasi Profesi Perbankan	6-7 November 2012	Bank kalsel-divisi sdm	
Selling Skill	23 Oktober 2012	P3i (pusat pengembangan profesi indo)	
Analisa Kredit Pertambangan	15-17 Oktober 2012	Bank kalsel-divisi sdm	
Studi Banding	14-19 Oktober 2011	Lppi	
Refresh Sertifikasi Manajemen Risiko	13 Okotober 2012	Bank kalsel-divisi sdm	
Budaya Perusahaan	11-12	Bank kalsel-	

		Agustus 2012	divisi sdm
	Budaya Perusahaan	10 Agustus 2012	Bank kalsel-divisi sdm
	Service Excellence	23-24 Juni 2012	Bank kalsel-divisi sdm
	Anti fraud	15 Juni 2012	Bank kalsel-divisi sdm
	3 Langkah Jitu Meraih Impian	15 Januari 2011	Hidup berkah center
	Motivasi	9 Juli 2011	Bank kalsel-divisi sdm
	Selling Skill	6-8 Juli 2011	Bank kalsel-divisi sdm
	BP/Ketentuan Divisi Dana Jasa	20 Juni 2011	Bank kalsel-divisi sdm
	Beaty Class	19 Juni 2011	Bank kalsel-divisi sdm
	Bidang Tugas Operasional	6-10 Juni 2011	Bank kalsel-divisi sdm
	Selling Skill	17-18 April 2011	Bank kalsel-divisi sdm
	BP/Ketentuan Divisi Kredit	1 April 2011	Bank kalsel-divisi sdm
	Serifikasi Manajemen Risiko Tingkat I	30 Agustus 2008	BSMR

JAMKRIDA
KALSEL

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tahun	Penyelenggara Tempat
1.	Muhammad Syarifuddin	Sertifikasi Kompetensi Penjaminan Sub Bidang Pengawasan Skema Komisaris	2025	Badan Nasional Sertifikasi Profesi – Lembaga Sertifikasi Penjaminan
		Program Pelatihan Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Skema Komisaris	2025	Bintang Cahaya Gempita
		Sosialisasi Laporan Dan Petunjuk Teknis Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional	2022	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Sosialisasi Dan Evaluasi Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan	2022	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan
		Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pelatihan Kepemimpinan Nasional	2021	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan
No.	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
2.	Rudi Ansyari	Pelatihan Sertifikasi Skema Komisaris	2025	BCG
		Penerapan Manajemen Risiko Operasional Yang Efektif & Pencegahan Fraud Diperbankan	2014	BSMR
		Risk Management Training	2003	Indonesia Banking Finance

				Training
		Kredit Sindikasi	2008	Batara Puri
		Credit Rating & Scoring Modeling	2006	M-Knows Consulting
		Managing Bond Investment & Fixed Income Product	2008	Human Capital Indonesia
		Asset Liability Management	2008	Human Capital Indonesia
		Asset Liability Management	2007	Orbit Risk Management
		Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Indonesia Level 2	2007	STIE Perbanas Surabaya
		Penyusunan Risk Profile Pada Bank	2005	Risk Management Center Indonesia
		Basic Treasury, Managing Of Financial Exposure, Asset & Liability Management	2002	Bankir Indonesia
		Strategic Marketing Plus	2001	Mark Plus Education
		Account Officer	1997	Bankir Indonesia
		Pengkajian Kemampuan Nasabah Mempereoleh Kredit	1997	Universitas Indonesia

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No.	Nama	Workshop/training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Abdul Halim Barkatullah	Pra Ijtima' Sanawi	26 – 27 September 2026	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
		Workshop Pra	24 – 25	Dewan Syariah

	Ijtima' Sanawi	September 2026	Nasional - Majelis Ulama Indonesia
	Sertifikasi DPS	15 Juni 2023	LSP-MUI
	Training Motivasi (Buka Mata Qalbu)	21 - 23 Juli 2023	Bumi Spiritual Itsbatulyaqiin
	Workshop Pra-Ijtima Sanawi (annual meeting) DPS VII tahun 2022	24/09/2022	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
	webinar workshop pra-ijtima'sanawi (annual meeeting) DPS tahun 2021 bidang pembiayaan, penjaminan, modal ventura, pegadaian & fintech syariah	04 & 09 Oktober 2021	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
	Sertifikasi webinar ijtima'sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah	2-3 Desember 2021	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
	Pelatihan daring dasar pengawas syariah bidang penjaminan syariah	22 April – 07 Mei 2021	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Institute
	Sertifikasi pelatihan dasar muamalah maliyah dan fatwa DSN – MUI	15-24 Oktober 2020	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Institute
	Workshop Research Reviewer Internasional Angkatan XIV 52 Jam Pelatihan	20- 24 Agustus 2019	Bogor, , Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	Workshop E-Learning Fakultas Hukum ULM	02 Oktober 2019	Banjarmasin. LP3 ULM
	Workshop Pengelolaan & Teknik Penulisan	21 sd 22 April 2017	Bandung, Relawan Jurnal Indonesia bekerjasama

	Jurnal Elektronik Terstandar Akreditasi		dengan Universitas Padjajaran
	Learning Program on Strategic Leadership and Governance for Academic and Administrative Leaders of Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia	13-19 November	Philippines, Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Educational Innovation and Technology, Seameo Innotech Diliman, Queen City, Philippines
	Workshop Pembelajaran Aktif	22 Agustus 2016	Banjarmasin, LP3) Universitas Lambung Mangkurat
	Workshop Penyusunan Buku Ajar	15 Agustus 2016	Banjarmasin, LP3 Universitas Lambung Mangkurat
	Pelatihan Applied Approach (AA)	28 -31 Mei 2012	Banjarmasin , P3AI Universitas Lambung Mangkurat
	TOT Pelatihan PEKERTI/AA di Perguruan Tinggi	Februari 2012	ITS Surabaya
	Pelatihan Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Perguruan Tinggi Melalui ALFHE	56 – 6 Juli 2010	DBE 2, Jakarta
	TOT Nasional-Ekspansi 2010	1-5 Maret 2010	Konsorsium PTN-KTI , Gorontalo

		Pembelajaran Aktif untuk Perguruan Tinggi (ALFHE) II		
		TOT Nasional-Ekspansi 2010 Pembelajaran Aktif untuk Perguruan Tinggi (ALFHE) I	1-5 Februari 2010	Konsorsium PTN-KTI , Makassar
No.	Nama	Workshop/training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
2	Akhmad	pelatihan ijtima' sanawi	11-12 oktober 2025	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
		Sertifikasi badan nasional sertifikasi profesi	22 juli 2025	Majelis Ulama Indonesia Bidang Ekonomi Syariah
		webinar workshop pra-ijtima'sanawi (annual meeeting) DPS tahun 2023 bidang pembiayaan, penjaminan, modal ventura, pegadaian & fintech syariah	06 September 2023	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
		Sertifikasi workshop pra-ijtima' sanawi (Annual Meeting) Dewan pengawas syariah VIII 2023	20 Oktober 2023	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
		Topik "Pelatihan Daring Dasar Pengawas Syaiah Bidang Pembiayaan Syariah" Di dalam pelatihan ini memuat materi tentang Pengantar Perusahaaa Pembiayaan Syariah, Regulasi Perusahaan	2021	DSN-MUI Institute

		Pembiayaan Syariah, Akuntansi Syariah, Konsep dan Praktik Pemasaran Syariah, Akta Perjanjian Syariah, Opini Syariah, Standar Operasional Procedure (SOP), Simulasi Produk Baru dan Evaluasi Uji Petik.		
		Topik Kuliah Umum "Internalisasi Nilai-nilai Aswaja dalam Pendidikan Modern – Narasumber Dr. H. Arrazy Hasyim, Lc., MA"	2021	Institut Agama Islam Darussalam Martapura
		Topik Sosialisasi "Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)"	2021	Citra Institute
		Sertifikasi pelatihan dasar pengawas syariah bidang pembiayaan syariah	22 April – 07 Mei 2021	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
		Topik "Youth and Spiritual Values Under The Light Of The Qur'an Lessons From Said Nursi's Works"	2020	UIN Antasari Banjarmasin – Yayasan Nur Semesta Tangerang – Istanbul Ilim Ve Kultur Vakfi
		Topik "Peran IAI	2020	Fakultas

	Darussalam Martapura dalam Pengembangan Ekonomi Islam – Narasumber Ustadz Abdul Somad, Lc., MA., Ph.D"		Ekonomi dan Bisnis Islam - Institut Agama Islam Darussalam Martapura
	Topik "Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI" Di dalam pelatihan ini memuat materi tentang Mengenal DSN-MUI, Ushul Fiqh, Qawaid Fiqhiyah, Pengantar Muamalah, Akad-akad Syariah, Pengantar LKS/LBS.	2020	DSN-MUI Institute
	Topik Seminar "Hidup Penuh Berkah Dengan Asuransi Syariah"	2019	Masyarakat Ekonomi Syariah – Kalimantan Selatan
	Topik Forum Diskusi "Perkembangan Terkini Ekonomi Indonesia dan Tantangan Kedepan"	2019	Bank Indonesia
	Topik "TTT Empowiring Quantum Training". Melalui sertifikat ini diperbolehkan untuk melakukan Basic Training Quantum secara mandiri, dengan tetap dimonitor oleh Divisi Takaful Recruitment and	2019	Takaful Keluarga – Sharia Life Insurance

	Sales Academy.		
	Sertifikasi pelatihan pengembangan potensi diri intra dan interpersonal skill	21-22 Agustus 2019	Kalimantan selatan dan tengah Mubarak ,M.A
	Topik "Pelatihan Pengembangan Potensi Diri Intra dan Interpersonal Skill" Di dalam pelatihan ini memuat materi tentang Public Speaking, Konsep Diri, Kecerdasan Emosi, Authentic Leadership, Pikiran Adaktif dan Kalimat Positif, Motivasi.	2019	UIN Antasari Banjarmasin – Asosiasi Psikologi Islam Kalimantan Selatan dan Tengah
	Topik "Kios Bakat dan Minat Mahasiswa UIN Antasari Bidang Menulis Kreatif Tahun 2018"	2018	UIN Antasari Banjarmasin
	Topik "Risk Management Awareness	2017	PT. Efektifpro Knowledge Source
	Topik "Konsep Ashnaf Tsamaniyyah Mustahiq Zakat Konstektual"	2015	Bank Kalsel Syariah – Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
	Topik "Bedah Buku Akbar "Rahasia Sukses Orang Halabiu Karya DR. Muhaimin, S.Ag., M.A" dan "Api Tauhid Karya Habiburrahman El Shirazy"	2015	Bank Kalsel Syariah – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Banjarmasin
	Topik "Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang	2015	Kementerian Agama Provinsi

	Pengelolaan Zakat bagi Instansi dan BUMN/BUMD"		Kalimantan Selatan
	Topik "Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah"	2015	Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
	Topik "Kalimantan di Tengah Arus MEA 2015"	2015	KAHMI Kalimantan Selatan – HIPMI Bakorwil Kalimantan Selatan
	Bank Kalsel – Iqtishad Consulting	2012	Topik "Inhouse Training Fikih Muamalah Intermediate On Islamic Banking"
	Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin	2010	Topik "Pelatihan Dasar Bahasa Mandarin"
	Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin	2010	Topik "Pelatihan Pengembangan Keterampilan Praktis Keagamaan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin"
	Topik "Orientasi Metodologi Penelitian Ekonomi Islam"	2009	HMJ Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin – Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Kalimantan Selatan
	Istana Modal Banjarmasin - HMJ Ekonomi	2009	Topik "Seminar Nasional Ekonomi Islam – Bisnis

		Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin		Islami, Solusi Krisis Global
		Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin – Tim Pengelola Kemampuan Membaca Kitab Kuning/ Program Amsilati	2009	Topik “Pelatihan Kemampuan Membaca Kitab Kuning/ Program Amsilati

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Kegiatan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris, diantaranya :

Rapat Triwulan I Dewan Komisaris

Kinerja keuangan Triwulan I tahun 2025 (terlampir) disampaikan oleh Direktur Utama PT. Jamkrida Kalsel, diantaranya sebagai berikut:

- **Total Imbal Jasa Penjaminan (IJP):**
 - IJP Cash Basis: Realisasi sebesar Rp 24.868.580.174 dengan target sebesar Rp 12.195.093.235, sehingga pencapaian mencapai 204%.
 - IJP Accrual: Realisasi sebesar Rp 17.501.453.326 dengan target sebesar Rp 9.349.330.896, mencapai 187%.
- **Beban Klaim:** Jumlah beban klaim pada Triwulan I terealisasi sebesar Rp 3.828.370.177 dari target sebesar Rp 1.755.728.098, atau dengan tingkat pencapaian sebesar 218%.
- **Nilai Penjaminan:** Total Nilai Penjaminan pada Triwulan I mencapai Rp 4.288.761.029.683 dibandingkan dengan target sebesar Rp 515.215.035.358, mencatatkan pencapaian signifikan sebesar 832%.
- **Laba Perusahaan:** Laba bersih (sebelum pajak sesuai tabel) untuk Triwulan I

terrealisasi sebesar Rp 3.453.754.236 dibandingkan dengan target sebesar Rp 227.520.458, atau menunjukkan performa luar biasa sebesar 1518%.

- Pendapatan Subrogasi: Realisasi Pendapatan Subrogasi adalah sebesar Rp 1.380.282.611 dengan target sebesar Rp 796.467.898, sehingga pencapaian berada di angka 173%.
- Indikator Volume & Kesejahteraan:
 - Terjamin: Terealisasi sebanyak 63.206 orang dari target 6.190 (1021%).
 - Tenaga Kerja: Menyerap/melindungi 231.624 tenaga kerja dari target 37.211 (622%).
- Aset: Posisi Aset perusahaan berada di angka Rp 398.088.056.710 dari target Rp 311.398.327.743, atau mencapai 128%.

Kejadian Penting

- Telah disahkannya Perda Perubahan Bentuk Hukum menjadi Perseroada serta Perda Penyertaan Modal senilai Rp 98 Miliar.
- Realisasi setoran modal tahap I dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 50 Miliar pada Triwulan I 2025. Langkah ini secara efektif menurunkan beban *Gearing Ratio* yang per Desember 2024 telah mencapai 37,99 kali (mendekati batas maksimum OJK 40 kali), sehingga memastikan keberlanjutan ekspansi bisnis penjaminan.
- Telah diselesaikannya Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk lini produk Multiguna, KPR, Konstruksi, dan Kontra Bank Garansi.
- Penyesuaian mencakup standardisasi ulang *Tarif Imbal Jasa Penjaminan (UP)* dan perbaikan *Terms & Conditions* guna memitigasi kenaikan rasio klaim serta menjaga profitabilitas portofolio.
- Pelaksanaan pengumpulan informasi keuangan oleh BPKP (23-25 September 2024) untuk periode Tahun Buku 2019-2023 sebagai bentuk transparansi pengelolaan BUMD.
- Telah dilaksanakannya agenda Pra-Exit Meeting dengan BPKP sebagai tahap akhir

evaluasi kinerja keuangan dan operasional.

- Manajemen tengah melakukan koordinasi intensif (*follow-up*) dengan Pemegang Saham terkait rencana penyetoran modal Tahap II guna mendukung target pertumbuhan jangka panjang 2026-2029.

Tanggapan dan Masukan Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris memberikan apresiasi tertinggi atas dedikasi seluruh insan PT Jamkrida Kalsel yang berhasil melampaui target laba secara signifikan pada TW I. Prestasi ini merupakan momentum kuat untuk mencapai target strategis 2026-2029.
- Mendukung penuh langkah Direksi melakukan addendum PKS pada lini produk utama. Penyesuaian *Tariff* dan *Term & Condition* harus dipastikan mampu mengendalikan rasio klaim yang saat ini berada di atas target, dengan tetap menjaga transparansi komunikasi kepada mitra perbankan.
- Mencermati *Gearing Ratio* yang menyentuh level kritis 37,99x, Dewan Komisaris menegaskan bahwa realisasi penyertaan modal tahap I sebesar Rp 50 Miliar adalah prioritas mutlak untuk menjaga keberlangsungan operasional penjaminan. Direksi diinstruksikan untuk segera melakukan re-kalkulasi kapasitas penjaminan pasca-setoran modal.
- Mendukung sepenuhnya transparansi pemeriksaan BPKP. Dewan Komisaris menginstruksikan manajemen untuk bersifat kooperatif dan segera mengimplementasikan setiap rekomendasi perbaikan guna mencapai tata kelola keuangan yang tanpa cela (*zero finding*).

Tanggapan Direksi

Berdasarkan seluruh tanggapan dan masukan dari Dewan Komisaris, Direksi akan segera melakukan audit internal terhadap portofolio penjaminan dengan rasio klaim tinggi dan memastikan implementasi *Addendum PKS* (tarif dan syarat baru) berjalan efektif untuk menekan beban klaim di Triwulan II. Dengan terealisasinya setoran

modal Rp50 Miliar, Direksi akan melakukan penataan ulang kuota penjaminan guna memastikan *Gearing Ratio* kembali ke level aman (di bawah 35x) tanpa menghentikan dukungan pada sektor UMKM. Melakukan pengawalan ketat terhadap proses administrasi perubahan bentuk menjadi **Perseroda** serta mempercepat integrasi sistem SIKP untuk peluncuran KUR Syariah. Menindaklanjuti seluruh catatan pra-exit meeting BPKP dengan segera menyediakan data yang diperlukan dan melakukan perbaikan prosedur administratif sesuai rekomendasi. Direksi memastikan bahwa setiap langkah pengejaran target laba akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudence principle*) dan kepatuhan terhadap regulasi OJK demi keberlanjutan perusahaan jangka panjang.

Rapat Triwulan II Dewan Komisaris

Kinerja keuangan Triwulan II tahun 2025 (terlampir) disampaikan oleh Direktur Utama PT. Jamkrida Kalsel, diantaranya sebagai berikut:

- **Total Imbal Jasa Penjaminan (IJP):**
 - IJP Cash Basis: Realisasi mencapai Rp 39.931.451.132 dari target Rp 24.693.652.498, dengan persentase pencapaian sebesar 162%.
 - IJP Accrual: Realisasi sebesar Rp 35.879.991.029 dari target Rp 18.698.661.792, mencapai 192%.
- **Beban Klaim:** Jumlah beban klaim pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 9.385.472.360 dengan target sebesar Rp 4.300.492.171, atau pencapaian sebesar 218%.
- **Nilai Penjaminan:** Total Nilai Penjaminan pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.006.416.647.643 dari target sebesar Rp 1.030.430.070.715, dengan tingkat pencapaian sebesar 98%.
- **Laba Perusahaan:** Laba perusahaan terealisasi sebesar Rp 6.906.038.288 dibandingkan dengan target sebesar Rp 828.243.029, yang menunjukkan pencapaian sebesar 834%.
- **Pendapatan Subrogasi:** Realisasi Pendapatan Subrogasi adalah sebesar Rp

1.845.343.740 dengan target sebesar Rp 1.476.015.738, sehingga pencapaian berada di angka 125%.

- Pendapatan Investasi: Realisasi mencapai Rp 3.936.957.613 dari target Rp 3.694.938.701, atau sebesar 107%.
- Indikator Volume:
 - Terjamin: Terealisasi sebanyak 9.707 orang dari target 6.190 (157%).
 - Tenaga Kerja: Melindungi 50.815 tenaga kerja dari target 37.211 (137%).
- Aset: Posisi Aset perusahaan mencapai Rp 401.011.172.269 dari target Rp 361.021.614.782, dengan pencapaian 111%.

Kejadian penting

- Tercatat adanya klaim material yang bersumber dari proyek strategis, yaitu KSO Asri Praya dan Kredit Konstruksi PT Panji (Proyek Jembatan Batulicin-Kotabaru). Hal ini menjadi faktor utama melampauinya beban klaim dari target awal.
- Pengesahan Perda No. 9 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum atas total penambahan modal sebesar Rp98 Miliar dan *Inbreng* Rp7 Miliar. Perusahaan telah menerima setoran tahap awal sebesar Rp48 Miliar di awal 2025, sementara sisa Rp50 Miliar dan proses *Inbreng* sedang dalam koordinasi intensif dengan BPKAD.
- Teridentifikasi tren penurunan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari mitra utama (Bank Kalsel) dalam tiga bulan terakhir. Hal ini memerlukan langkah re-strategi pemasaran dan diversifikasi produk untuk menjaga stabilitas pendapatan.

Tanggapan dan Masukan Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pencapaian laba dan pertumbuhan perusahaan pada Triwulan II, yang diharapkan menjadi fundamen kuat bagi target kinerja Triwulan III dan IV.
- Menyikapi masuknya klaim dari proyek KSO Asri Praya dan PT Panji (Jembatan Batulicin), Dewan Komisaris menginstruksikan Direksi untuk melakukan penanganan secara profesional melalui proses verifikasi yang ketat dan transparan.

Direksi wajib memastikan kepatuhan terhadap prosedur klaim serta segera merumuskan strategi *recovery* (subrogasi) guna memitigasi dampak terhadap laba perusahaan.

- Penurunan UP dari Bank Kalsel dalam 3 bulan terakhir harus direspon dengan langkah nyata. Dewan Komisaris meminta Direksi segera melakukan *High Level Meeting* dengan Bank Kalsel untuk mengidentifikasi hambatan serta menyusun strategi pemulihan melalui inovasi produk penjaminan yang lebih kompetitif.
- Ke depan, dokumentasi penjaminan dan analisis *feasibility* proyek konstruksi skala besar harus ditingkatkan kualitasnya guna meminimalisir risiko klaim serupa dan menjaga integritas portofolio penjaminan perusahaan.

Tanggapan Direksi

Berdasarkan seluruh tanggapan dan masukan dari Dewan Komisaris, Direksi menerima seluruh arahan Dewan Komisaris dan akan segera menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) untuk penyelesaian klaim proyek strategis serta melakukan evaluasi komprehensif terhadap portofolio Bank Kalsel. Laporan progres atas langkah-langkah tersebut akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Dewan Komisaris.

Rapat Triwulan III Dewan Komisaris

Kinerja keuangan Triwulan III tahun 2025 (terlampir) disampaikan oleh Direktur Utama PT. Jamkrida Kalsel, diantaranya sebagai berikut:

- Total Imbal Jasa Penjaminan (UP):
 1. UP Cash Basis: Realisasi mencapai Rp 52.473.370.964 dari target Rp 37.040.478.747, dengan persentase pencapaian sebesar 142%.
 2. UP Accrual: Realisasi sebesar Rp 53.452.578.187 dari target Rp 28.047.992.688, mencapai 191%.
- Beban Klaim: Jumlah beban klaim pada Triwulan III terealisasi sebesar Rp 18.140.170.672 dengan target sebesar Rp 7.331.494.880, atau pencapaian sebesar 247%.

- Nilai Penjaminan: Total Nilai Penjaminan pada Triwulan III terealisasi sebesar Rp 876.973.948.292 dari target sebesar Rp 1.545.645.106.073, dengan tingkat pencapaian sebesar 57%.
- Laba Perusahaan: Laba perusahaan terealisasi sebesar Rp 2.089.912.093 dibandingkan dengan target sebesar Rp 2.956.055.235, yang menunjukkan pencapaian sebesar 71%.
- Pendapatan Subrogasi: Realisasi Pendapatan Subrogasi adalah sebesar Rp 2.220.993.596 dengan target sebesar Rp 2.212.748.544, sehingga pencapaian berada di angka 100%.
- Pendapatan Investasi: Realisasi mencapai Rp 6.718.310.693 dari target Rp 6.636.839.302, atau sebesar 101%.
- Indikator Volume:
 1. Terjamin: Terealisasi sebanyak 14.303 orang dari target 6.999 (204%).
 2. Tenaga Kerja: Melindungi 82.625 tenaga kerja dari target 32.953 (251%).
- Aset: Posisi Aset perusahaan mencapai Rp 438.634.218.970 dari target Rp 407.430.163.673, dengan pencapaian 108%.

Kejadian Penting

- Realisasi setoran modal sebesar **Rp 48 Miliar** telah diterima pada 30 September 2025. Namun, secara legalitas, dana tersebut belum dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas penjaminan (*BMS*) karena masih menunggu pengesahan dalam **RUPS Luar Biasa**.
- Percepatan RUPS LB menjadi prioritas utama guna menurunkan *Gearing Ratio* dan memastikan kepatuhan terhadap batasan maksimum regulasi OJK.
- Terdapat risiko degradasi modal akibat proyeksi pembayaran **Klaim Pending** yang signifikan dalam periode mendatang.
- Manajemen mencatat adanya peningkatan saldo piutang subrogasi. Hal ini menuntut strategi penagihan (*recovery*) yang lebih agresif guna memulihkan likuiditas dan menjaga rasio kecukupan modal.

- Proses administrasi untuk *Fit and Proper Test* Calon Direktur Utama dan Komisaris Independen telah diajukan kepada OJK. Perusahaan saat ini berada dalam posisi proaktif menunggu jadwal resmi guna melengkapi struktur organ utama sesuai standar GCG.

Tanggapan dan Masukan Dewan Komisaris

- Mengucapkan terima kasih atas kinerja yang telah ditunjukkan pada Triwulan III ini. Semoga pencapaian tersebut menjadi langkah baru bagi perusahaan untuk terus bertumbuh dan meningkatkan laba pada Triwulan III mendatang.
- Fokus Strategis pada Klaim dan Optimalisasi Subrogasi Menjelang Akhir Tahun 2025. Komisaris Utama menegaskan pentingnya fokus yang sangat ketat dan terperinci pada pengelolaan klaim yang ada serta pengoptimalan upaya penagihan subrogasi. Perusahaan diinstruksikan untuk terus memonitor secara intensif perkembangan klaim dan subrogasi hingga akhir Desember 2025. Hal krusial adalah adanya pelaporan rutin dan akurat mengenai jumlah riil dana subrogasi yang telah berhasil tertagih, memastikan bahwa kinerja penagihan subrogasi dapat diukur dan dievaluasi secara berkelanjutan.
- Sinergi dan Kewaspadaan Terhadap Beban Klaim di JAMKRIDA KALSEL. Komisaris Utama menyoroti risiko yang tidak boleh terjadi, yaitu akumulasi beban klaim yang semakin menumpuk di Jamkrida Kalsel, terutama jika terjadi penurunan Non-Performing Loan (NPL) pada Bank Kalsel. Sinergi ini mengindikasikan adanya pergeseran risiko, yang harus diantisipasi dan dikelola dengan baik.
- Evaluasi Kepatutan dan Risiko dalam Pemberian Jaminan (Proyek Besar dan Tanpa Agunan). Arahkan Komut menekankan pentingnya kehati-hatian maksimal dalam menyetujui permohonan jaminan, khususnya untuk proyek-proyek berskala besar dan yang tidak didukung oleh agunan yang memadai. Tim analisis risiko diwajibkan untuk melakukan kajian mendalam mengenai kelayakan proyek, kredibilitas kontraktor, dan potensi risiko gagal bayar, agar Jamkrida Kalsel tidak menanggung risiko jaminan yang terlalu tinggi tanpa perlindungan yang setara untuk mitigasi

risiko.

- Evaluasi Mendalam atas Proyek Gagal Klaim dengan Nominal Signifikan. Perusahaan diinstruksikan untuk segera menjadikan kasus proyek yang mengalami kegagalan dan menimbulkan klaim dengan nilai yang cukup besar sebagai agenda utama untuk dievaluasi secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi proses *underwriting* yang telah dilakukan, serta menarik pelajaran penting (*lessons learned*) guna perbaikan kebijakan dan prosedur penjaminan di masa mendatang.
- Tanggung Jawab Moral dan Keuangan Terkait Penambahan Modal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Komisaris Utama mengingatkan bahwa Pemprov telah memberikan dukungan signifikan melalui penambahan modal. Oleh karena itu, Jamkrida Kalsel memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan tersebut dan tidak boleh justru menjadi beban finansial bagi Pemprov akibat tingginya klaim. Sehingga perlu dilakukan pertemuan dengan Bank Kalsel sehingga kedua belah pihak bisa sama – sama tumbuh, serta pentingnya penjaminan proyek harus selalu dipertimbangkan dengan cermat, memastikan bahwa setiap jaminan yang diberikan berkontribusi positif dan memberikan dampak baik bagi pembangunan daerah dan Pemprov Kalsel.
- Peningkatan Kualitas Analisis Risiko dan Maksimasi Penagihan Subrogasi. Diperlukan langkah-langkah nyata untuk melaksanakan analisis kelayakan yang lebih ketat dan berlapis guna meminimalkan potensi terjadinya klaim di kemudian hari. Selain itu, upaya penagihan subrogasi harus dimaksimalkan dengan strategi yang terencana dan efektif, termasuk penggunaan segala instrumen hukum yang tersedia untuk mengamankan aset Perusahaan dan pemberian *collecting fee* sesuai aturan.
- Target Jangka Pendek dan Visi Jangka Menengah (2026). Fokus utama dalam dua bulan terakhir tahun ini adalah upaya intensif dan terukur untuk mengurangi beban klaim secara signifikan. Keberhasilan dalam target ini akan menjadi fondasi penting agar pada tahun 2026 perusahaan dapat sepenuhnya berfokus pada upaya

penyehatan kinerja keuangan secara menyeluruh dan peningkatan laba perusahaan yang berkelanjutan. Selain itu, tentu saja dalam penyaluran kredit bank mitra semakin sehat dan kualitas lancar.

- Pemetaan Aset Subrogasi dan Pelibatan Aparat Penegak Hukum (APH). Jamkrida Kalsel diminta segera melakukan pemetaan detail terhadap total nilai subrogasi yang mencapai Rp 76 Miliar. Pemetaan ini harus mengidentifikasi secara spesifik agunan atau aset apa saja yang masih dapat diselamatkan dan dijadikan jaminan. Jika diperlukan, Jamkrida Kalsel didorong untuk melakukan kerjasama formal dengan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya dengan Kejaksaan, untuk memastikan para pihak akan bertanggung jawab memenuhi kewajiban mereka terhadap Perusahaan karena merupakan uang negara.
- Agenda Pertemuan Koordinasi Lintas Sektoral yang Segera Dijadwalkan. Komisaris Utama menginstruksikan agar segera diagendakan pertemuan koordinasi strategis yang melibatkan semua pemangku kepentingan utama yaitu Bank Kalsel, Biro Ekonomi Pemprov selaku pembina BUMD, Jamkrida Kalsel, serta penting pula untuk melibatkan pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diskusi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi risiko bersama, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan kedepannya agar bisa tumbuh bersama secara positif.
- Permintaan Data Kontraktor Bonafide dari Biro PBJ. Untuk memperkuat proses *underwriting*, Perusahaan diminta mengirimkan surat resmi kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) guna meminta daftar data kontraktor yang memiliki rekam jejak yang baik (*bonafide*). Data ini akan sangat penting sebagai referensi dalam proses seleksi risiko penjaminan proyek konstruksi.
- Tindak Lanjut Spesifik untuk Klaim Proyek Pandji Bangun Persada. Terkait dengan kasus Klaim Proyek Pandji Bangun Persada, perlu segera dilakukan diskusi komprehensif yang melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu Bank Kalsel dan Dinas Pekerjaan Umum. Sebagai langkah awal dan tindak lanjut segera, Bapak Sekretaris Daerah/Komisaris Utama JAMKRIDA KALSEL akan memanggil Kepala Dinas P.U. untuk melakukan diskusi lanjutan guna mencari solusi bersama dan memastikan

pemenuhan tanggung jawab yang diperlukan.

Tanggapan dan Masukan Direksi

Berdasarkan seluruh tanggapan dan masukan dari Dewan Komisaris, Direksi menerima seluruh arahan Dewan Komisaris dan akan segera menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) untuk penyelesaian klaim proyek strategis serta melakukan evaluasi komprehensif terhadap portofolio Bank Kalsel. Laporan progres atas langkah-langkah tersebut akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Dewan Komisaris.

Rapat Triwulan IV Dewan Komisaris

Kinerja keuangan Triwulan IV tahun 2025 (terlampir) disampaikan oleh Direktur Utama PT. Jamkrida Kalsel, diantaranya sebagai berikut:

- **Total Imbal Jasa Penjaminan (IJP):**
 - IJP Cash Basis: Realisasi mencapai Rp 58.777.874.668 dari target Rp 49.387.304.996, dengan persentase pencapaian sebesar 119%.
 - IJP Accrual: Realisasi sebesar Rp 69.310.320.231 dari target Rp 37.397.323.584, mencapai 185%.
- **Beban Klaim:** Jumlah beban klaim pada Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 30.243.381.649 dengan target sebesar Rp 9.874.305.999, atau pencapaian sebesar 306%.
- **Nilai Penjaminan:** Total Nilai Penjaminan pada Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 2.941.686.903.029 dari target sebesar Rp 2.060.860.141.430, dengan tingkat pencapaian sebesar 143%.
- **Laba Perusahaan:** Laba perusahaan terealisasi sebesar Rp 552.929.703 dibandingkan dengan target sebesar Rp 3.260.021.593, yang menunjukkan pencapaian sebesar 17%.
- **Pendapatan Subrogasi:** Realisasi Pendapatan Subrogasi adalah sebesar Rp 3.149.507.663 dengan target sebesar Rp 2.949.481.350, sehingga pencapaian berada di angka 107%.

- Pendapatan Investasi: Realisasi mencapai Rp 8.886.302.961 dari target Rp 9.478.179.466, atau sebesar 94%.
- Indikator Volume:
 - Terjamin: Terealisasi sebanyak 18.999 orang dari target 12.380 (153%).
 - Tenaga Kerja: Melindungi 82.625 tenaga kerja dari target 74.423 (111%).
- Aset: Posisi Aset perusahaan mencapai Rp 424.265.068.024 dari target Rp 405.737.434.059, dengan pencapaian 105%.

Kejadian Penting

- Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) utama dan target strategis tahun 2026.
- Penyelarasan rencana kerja dengan ketersediaan anggaran (plafon anggaran 2026).
- Evaluasi kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) petahana.
- Penetapan kriteria seleksi calon KAP (independensi, kompetensi industri, dan kewajaran harga).
- Pembahasan transformasi digital atau pembaruan sistem informasi internal.
- Penyesuaian kebijakan organisasi terhadap regulasi terbaru yang berlaku.

Tanggapan dan Masukan Dewan Komisaris

- Kinerja pada Triwulan IV sudah sangat baik diharapkan seluruh jajaran direksi dan karyawan harus fokus pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. pada Triwulan I tahun 2026 agar bisa memperoleh laba yang maksimal.
- Penyelesaian addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) Multiguna, KPR, Konstruksi, dan Kontra Bank Garansi dengan penyesuaian tarif dan term condition merupakan langkah strategis yang akan memperkuat posisi perusahaan dalam pasar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan di masa mendatang.
- Dengan status sebagai Persero, perusahaan akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, tambahan modal yang

signifikan ini akan memperkuat struktur permodalan perusahaan dan mendukung ekspansi bisnis.

- Meskipun posisi gearing ratio saat ini masih di atas batas maksimal yang ditetapkan, saya optimis bahwa dengan adanya penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi pada awal tahun 2026, rasio keuangan perusahaan akan kembali ke level yang sehat. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Tanggapan dan Masukan Direksi.
- Pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap pengelolaan keuangan. Saya berharap hasil pemeriksaan ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Tanggapan dan Masukan Direksi

Berdasarkan seluruh tanggapan dan masukan dari Dewan Komisaris, Direksi menerima seluruh arahan Dewan Komisaris dan akan segera menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) untuk penyelesaian klaim proyek strategis serta melakukan evaluasi komprehensif terhadap portofolio Bank Kalsel. Laporan progres atas langkah-langkah tersebut akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Dewan Komisaris.

Rapat Triwulan I Dewan Pengawas Syariah

Kinerja keuangan Triwulan I tahun 2025 (terlampir) disampaikan oleh Direktur Utama PT. Jamkrida Kalsel, diantaranya sebagai berikut:

- Total Pendapatan (IJK Cash Basis): Total pendapatan Unit Usaha Syariah pada Triwulan I terealisasi sebesar Rp 5.693.728.581 dari target Rp 1.520.072.415, sehingga mencatatkan pencapaian sebesar 375%.
- IJK Accrual terealisasi sebesar Rp 944.523.430 atau 105% dari target.
- Nilai Kafalah: Realisasi Nilai Kafalah mencapai Rp 95.005.689.116 dari target sebesar Rp 69.689.967.826, atau tercapai sebesar 136%.
- Beban Ta'widh (Klaim): Total pembayaran Ta'widh pada Triwulan I terealisasi sebesar Rp 345.366.319 dari target sebesar Rp 290.130.098, dengan persentase

pencapaian sebesar 119%.

- Laba Perusahaan: Laba pada Triwulan I terealisasi sebesar Rp 433.525.944 dari target sebesar Rp 5.098.383, mencatatkan pencapaian luar biasa sebesar 8503%.
- Pendapatan Subrogasi: Pendapatan Subrogasi Syariah terealisasi sebesar Rp 132.404.000 dari target Rp 45.156.688, dengan tingkat pencapaian sebesar 293%.
- Pendapatan Investasi: Realisasi berada di angka Rp 145.615.085 atau 77% dari target.
- Indikator Volume (Pihak Terjamin):
 - Makhfuul 'Anhu: Terealisasi sebanyak 611 dari target 776 (79%).
 - Tenaga Kerja: Melindungi 6.380 tenaga kerja dari target 4.111 (155%).
- Aset: Posisi Aset Unit Usaha Syariah berada di angka Rp 59.759.366.371 dari target Rp 30.638.219.491, mencapai 195%.

Kejadian Penting

- Manajemen mencatat kewajiban peningkatan Ekuitas Nasional menjadi Rp250 Miliar. Hal ini memperkuat urgensi pengesahan RUPS atas modal Rp48 Miliar yang telah masuk dan rencana setoran tahap berikutnya.
- Penyesuaian Biaya Akuisisi dari 20% menjadi 10% sesuai ketentuan terbaru.
- Pengetatan proses analisis kelayakan untuk plafon di atas Rp50 Juta dan kewajiban agunan untuk penjaminan ulang di atas Rp500 Juta.
- Menindaklanjuti arahan OJK melalui ASPENDA untuk penunjukan Aktuaris guna penentuan tarif batas bawah dan batas atas UP/IJK.
- Mempersiapkan peta jalan (*Roadmap*) pemisahan UUS sesuai amanat POJK No. 10 Tahun 2023.
- Finalisasi PKS dengan Bank Kalsel Syariah, Koperasi UIN Antasari, dan penjajakan strategis dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Semester II 2026.
- Implementasi *Share Kafalah* bersama Jamsyar untuk memperluas kapasitas penjaminan syariah.
- Menetapkan target pertumbuhan kontribusi UP Syariah guna menyeimbangkan

portofolio terhadap penjaminan konvensional.

- Melakukan migrasi dan pemisahan sistem pelaporan bulanan UUS melalui sistem Apollo tersendiri untuk menjamin akurasi data dan kepatuhan regulasi pelaporan terpisah.
- Mengesahkan SOP Kafalah Non-Produktif dan Produktif yang telah mendapatkan opini kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Tanggapan dan Masukan Dewan Pengawas Syariah

- DPS menginstruksikan agar seluruh dokumen akad *Surety Bond* pada Unit Usaha Syariah (UUS) disusun dengan merujuk secara ketat pada Fatwa DSN-MUI terkini. Setiap akad wajib mendefinisikan objek jaminan secara spesifik (per objek) guna menjamin keabsahan syar'i dan menghindari ketidakpastian dalam operasional.
- Mendorong Manajemen untuk meningkatkan literasi kepada debitur mengenai konsep pengalihan hak tagih (*Hiwalah/Subrogasi*). Hal ini krusial agar jika terjadi wanprestasi, proses hukum dan penagihan dapat berjalan lancar tanpa hambatan syar'i maupun administratif.
- Mengingat adanya dinamika perubahan POJK (POJK No. 11/2025), DPS meminta Manajemen menyusun *timeline* kerja yang ketat agar seluruh penyesuaian aturan dapat tuntas dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan.
- DPS memberikan dukungan penuh atas rencana *Spinoff* UUS sesuai amanat POJK No. 10 Tahun 2023. DPS menekankan bahwa persiapan harus mencakup aspek kompetensi SDM yang menguasai fiqh muamalah, sistem operasional yang mandiri, serta struktur tata kelola yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kemanfaatan (*Maqashid Syariah*).

Tanggapan dan Masukan Direksi

Berdasarkan seluruh tanggapan dan masukan dari Dewan Komisaris, Direksi menerima seluruh arahan Dewan Komisaris dan akan segera menyusun Rencana

Aksi (*Action Plan*) untuk penyelesaian klaim proyek strategis serta melakukan evaluasi komprehensif terhadap portofolio Bank Kalsel. Laporan progres atas langkah-langkah tersebut akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Dewan Komisaris.

Rapat Triwulan II Dewan Pengawas Syariah

Kinerja keuangan Triwulan II tahun 2025 (terlampir) disampaikan oleh Direktur Utama PT. Jamkrida Kalsel, diantaranya sebagai berikut:

- **Total Pendapatan (UK Cash Basis):** Total pendapatan Unit Usaha Syariah pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 10.917.806.372 dari target Rp 1.520.072.415, mencatatkan pencapaian signifikan sebesar 718%.
- **UK Accrual:** Realisasi UK Accrual adalah sebesar Rp 2.265.396.011 dari target sebesar Rp 814.811.224, mencapai 278%.
- **Nilai Penjaminan:** Realisasi Nilai Penjaminan (Kafalah) mencapai Rp 411.205.146.428 dari target Rp 69.689.967.826, atau tercapai sebesar 590%.
- **Beban Ta'widh:** Total pembayaran Ta'widh pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 539.333.609 dengan target sebesar Rp 706.847.281, sehingga pencapaian berada di angka 76%.
- **Laba Perusahaan:** Laba perusahaan pada Triwulan II terealisasi sebesar Rp 1.261.169.224 dari target sebesar Rp 55.975.566, yang menunjukkan pencapaian sebesar 2253%.
- **Pendapatan Subrogasi:** Pendapatan Subrogasi Syariah terealisasi sebesar Rp 167.800.000 sesuai dengan target sebesar Rp 103.941.226, dengan persentase pencapaian sebesar 161%.
- **Indikator Volume:**
 1. Terjamin: Terealisasi sebanyak 5.775 orang dari target 614 (941%).
 2. Tenaga Kerja: Melindungi 10.060 tenaga kerja dari target 2.492 (403%).
- **Aset:** Posisi Aset Unit Usaha Syariah tercatat sebesar Rp 63.464.768.340 dari target

Rp 50.408.602.572, dengan pencapaian 126%.

Kejadian Penting

- Telah diselesaikannya penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra strategis nasional.
- Penandatanganan PKS *Co-Kafalah* dengan Jamkrida NTB Syariah guna memperkuat kapasitas penjaminan syariah dan diversifikasi risiko regional.
- Per November 2025, diputuskan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) tidak lagi melayani penjaminan jiwa. Seluruh PKS akan diperbarui untuk memfokuskan portofolio pada penjaminan pembiayaan produktif dan konsumtif.
- Implementasi Akad *Kafalah Bil Ujrah* kini telah dibedakan secara tegas melalui mekanisme persetujuan manual/spesifik oleh Kepala Cabang Bank Kalsel Syariah guna memastikan validitas akad sesuai kaidah fiqh muamalah.
- Menindaklanjuti temuan OJK mengenai percampuran dana investasi (*commingling of funds*), Manajemen telah menyiapkan rekening khusus syariah (*Escrow/Dedicated Account*).
- Pemindahan saldo dan pemisahan dana secara fisik akan dilaksanakan sepenuhnya pada penutupan tahun buku (akhir Desember 2025). Selama masa transisi, SPI diperintahkan melakukan pencatatan terpisah guna menjamin dana syariah tetap terlokalisasi secara administratif.

Kejadian Penting Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Pengawas Syariah mengapresiasi kinerja baik yang ditunjukkan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) PT Jamkrida Kalsel pada Triwulan II tahun 2025. Data menunjukkan beberapa pencapaian signifikan yang melampaui target, antara lain:
- Nilai Penjaminan: Realisasi nilai penjaminan mencapai kenaikan hingga 590%
- Pendapatan Imbal Jasa Kafalah (Netto): Realisasi pendapatan imbal jasa kafalah (netto) mencapai kenaikan 176%.
- Laba Perusahaan: Laba perusahaan tercatat mengalami kenaikan sebesar 2253%.

- Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa UUS PT Jamkrida Kalsel memiliki potensi yang besar dan mampu berkembang pesat dan bahkan setara dengan pendapatan konvensional. Laba yang meningkat dari waktu ke waktu juga menunjukkan kelayakan bisnis pada UUS.
- Prioritas utama saat ini adalah fokus pada pasar Bank Syariah Indonesia (BSI), karena sebelumnya kita belum pernah bekerja sama dengan mereka. BSI memiliki basis nasabah dan pengguna yang paling banyak di seluruh Indonesia, sehingga hal ini menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan portofolio bisnis kita.
- Mengenai POJK 11, kita harus mempelajari Bersama dan memahami bagaimana peraturan tersebut akan memengaruhi perkembangan bisnis syariah ke depannya.
- Maka, untuk PKS mendatang, perlu dipertimbangkan untuk menambahkan klausul yang secara spesifik mensyaratkan bahwa mitra kerja, terutama perusahaan, harus memiliki rekam jejak yang baik (bonafid). Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan memastikan kerja sama hanya dilakukan dengan pihak-pihak yang kredibel dan dapat dipercaya.

Tanggapan dan Masukan Direksi

Berdasarkan seluruh tanggapan dan masukan dari Dewan Komisaris, Direksi menerima seluruh arahan Dewan Komisaris dan akan segera menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) untuk penyelesaian klaim proyek strategis serta melakukan evaluasi komprehensif terhadap portofolio Bank Kalsel. Laporan progres atas langkah-langkah tersebut akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Dewan Komisaris.

Rapat Triwulan III Dewan Pengawas Syariah

Kinerja keuangan Triwulan III tahun 2025 (terlampir) disampaikan oleh Direktur Utama PT. Jamkrida Kalsel, diantaranya sebagai berikut:

- **Total Pendapatan (IJP Cash Basis):** Total pendapatan Unit Usaha Syariah pada Triwulan III terealisasi sebesar Rp 17.074.233.483 dari target Rp 1.824.086.898, mencatatkan pencapaian luar biasa sebesar 936%.
- **IJP Accrual:** Realisasi IJP Accrual adalah sebesar Rp 3.738.005.934 dari target sebesar Rp 1.079.393.891, mencapai 346%.
- **Nilai Penjaminan:** Realisasi Nilai Penjaminan mencapai Rp 162.571.744.532 dari target sebesar Rp 83.627.961.392, atau tercapai sebesar 194%.
- **Beban Klaim:** Total Beban Klaim pada Triwulan III terealisasi sebesar Rp 864.093.123 dengan target sebesar Rp 1.130.888.533, sehingga tingkat efisiensi beban berada di angka 76%.
- **Laba Perusahaan:** Laba perusahaan pada Triwulan III terealisasi sebesar Rp 2.394.257.963 dari target sebesar Rp 321.664.035, menunjukkan pencapaian sebesar 744%.
- **Pendapatan Subrogasi:** Pendapatan Subrogasi Syariah terealisasi sebesar Rp 257.646.926 dari target sebesar Rp 162.668.019, dengan persentase pencapaian sebesar 158%.
- **Indikator Volume:**
 1. **Terjamin:** Terealisasi sebanyak 2.077 orang dari target 776 (268%).
 2. **Tenaga Kerja:** Melindungi 10.825 tenaga kerja dari target 4.111 (263%).
- **Aset:** Posisi Aset Unit Usaha Syariah tercatat sebesar Rp 68.068.632.095 dari target Rp 78.542.940.132, atau mencapai 87%.

Kejadian Penting

- Penerapan ketentuan POJK Terbaru Nomor 11 Tahun 2025, yang mana ada beberapa perubahan ketentuan salah satunya Perusahaan Penjaminan tidak diperbolehkan lagi menjamin jiwa.
- Pembaruan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan penerapan ketentuan POJK Nomor 11 Tahun 2025.
- Adanya rencana Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara PT Jamkrida Kalsel, Bank

Kalsel dengan Perusahaan Asuransi Jiwa

- Dijelaskan bahwa sesuai ketentuan POJK 11 setiap pengajuan kredit dengan nilai lebih dari Rp 50.000.000 wajib melalui proses CBC.
- Unit Usaha Syariah sedang menyusun dan menyiapkan ketentuan serta prosedur operasional untuk penerapan layanan *One Day Service*. Agar proses pengajuan, verifikasi, dan pemberian keputusan dapat dilakukan dalam waktu satu hari kerja, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan memuaskan bagi mitra maupun pemohon.
- Untuk pengajuan kredit dengan jangka waktu lima tahun, kondisi pembayaran pada periode awal harus dalam keadaan lancar. Apabila terdapat riwayat kredit macet pada awal masa kredit, hal tersebut akan menjadi pertimbangan penting ketika pemohon mengajukan permohonan kredit kembali di masa depan. Evaluasi ini dilakukan untuk menjaga kualitas portofolio dan menekan potensi risiko kredit bermasalah.
- Terkait PKS Tripartit, Bank Kalsel selama ini telah merasa nyaman dengan skema pembayaran UK secara *bundling* (jiwa dan kredit) kepada Jamkrida Kalsel. Namun, dengan adanya penyesuaian POJK 11, pembayaran kini harus dilakukan secara terpisah, UK kredit dibayarkan kepada Jamkrida, sedangkan premi jiwa dibayarkan kepada Al Amin. Hal yang sama juga berlaku untuk pembayaran klaim—klaim kredit dibayarkan oleh JKS dan klaim jiwa dibayarkan oleh Al Amin.
- Saat ini Bank Kalsel sedang mengkaji opsi agar penempatan asuransi jiwa tidak hanya dilakukan melalui Al Amin, tetapi juga dapat menggunakan perusahaan asuransi lain, seperti Asuransi Sinarmas.
- Akan dilakukan sosialisasi kepada Bank Kalsel Cabang Syariah terkait teknis pelaksanaan produk yang harus disesuaikan dengan ketentuan POJK 11.
- OJK telah menyampaikan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan spin off pada tahun 2031. Hal ini sudah dipersiapkan oleh bagian Renbang. Salah satu persyaratannya adalah pemenuhan modal UUS sebesar Rp 50.000.000.000 dan pada tahun 2026, modal Jamkrida Kalsel dipastikan sudah memenuhi ketentuan

tersebut, dan kajiannya telah disiapkan.

- Terkait pemisahan penjaminan UUS dari penjaminan konvensional, kondisi UK saat ini dinilai sangat baik dan terus meningkat setiap tahun. Selain itu, pengajuan yang berpotensi menimbulkan klaim telah disaring terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi.
- Pada tahun 2026, Unit Usaha Syariah dinilai sudah mampu menjalankan operasional secara mandiri dan anggarannya telah dialokasikan dalam Renbis, khususnya untuk pengadaan aset tetap.
- Proses penyeteroran modal sebesar Rp 48.000.000.0000 telah diterima oleh Jamkrida Kalsel. Saat ini sedang dikejar penandatanganan dari para pemegang saham agar dana tersebut dapat segera digunakan dan dikelola oleh perusahaan.

Tanggapan dan Masukan Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Pengawas Syariah memberikan apresiasi atas pencapaian Unit Usaha Syariah yang sejak awal berdiri hingga saat ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi UUS itu sendiri, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kinerja Perusahaan.
- POJK Nomor 11 Tahun 2025 akan dipelajari lebih lanjut oleh DPS untuk memastikan seluruh ketentuan dapat diimplementasikan dengan baik. Apabila draft PKS sudah tersedia, maka pembahasan tidak hanya difokuskan pada aspek kepatuhan syariah, tetapi juga akan mencakup aspek legalitas agar dokumen tersebut benar-benar memenuhi standar hukum dan syariah.
- DPS juga menyarankan agar perusahaan mempertimbangkan opsi penyelenggaraan RUPS Luar Biasa secara offline. Untuk itu, perlu dipersiapkan undangan resmi, agenda rapat, serta pengaturan pemberian kuasa, khususnya apabila Gubernur selaku pemegang saham tidak dapat hadir secara langsung. Rekomendasi ini diberikan karena pelaksanaan RUPS secara sirkuler kerap menghadapi kendala dalam mengumpulkan tanda tangan seluruh pemegang saham, sehingga pelaksanaan *offline* dianggap lebih efektif dan efisien.

- DPS memberikan apresiasi atas inisiatif Unit Usaha Syariah dalam menyusun regulasi internal dan prosedur operasional untuk penerapan *One Day Service*. DPS menilai bahwa percepatan layanan ini tetap harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam proses akad, kejelasan dokumen, dan penilaian kelayakan penjaminan. Selama unsur kehati-hatian, transparansi, serta pemenuhan syarat akad terpenuhi, DPS mendukung implementasi layanan cepat ini sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada mitra dan pemohon.
- Terkait kegiatan *Ijtima' Sanawi* yang telah diikuti oleh anggota DPS, disampaikan bahwa terdapat banyak isu terkini yang dibahas, termasuk keluarnya lima fatwa terbaru. Dengan demikian, total fatwa DSN-MUI saat ini berjumlah 165 fatwa. Dari kegiatan tersebut, disarankan agar pada kesempatan berikutnya peserta yang mewakili DPS sebaiknya hadir minimal dua orang, mengingat banyaknya informasi strategis, pembahasan mendalam, serta penjelasan teknis yang diberikan selama kegiatan tersebut sehingga lebih efektif jika diikuti oleh lebih dari satu orang.

Tanggapan dan Masukan Direksi

Berdasarkan seluruh tanggapan dan masukan dari Dewan Komisaris, Direksi menerima seluruh arahan Dewan Komisaris dan akan segera menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) untuk penyelesaian klaim proyek strategis serta melakukan evaluasi komprehensif terhadap portofolio Bank Kalsel. Laporan progres atas langkah-langkah tersebut akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Dewan Komisaris.

Rapat Triwulan IV Dewan Pengawas Syariah

Kinerja keuangan Triwulan IV tahun 2025 (terlampir) disampaikan oleh Direktur Utama PT. Jamkrida Kalsel, diantaranya sebagai berikut:

- Total Pendapatan (UP Cash Basis): Total pendapatan Unit Usaha Syariah pada

Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 19.461.347.094 dari target Rp 6.080.289.659, sehingga mencatatkan pencapaian sebesar 320%.

- IJP Accrual: Realisasi IJP Accrual adalah sebesar Rp 5.045.384.211 dari target sebesar Rp 3.597.979.636, mencapai 140%.
- Nilai Penjaminan: Realisasi Nilai Penjaminan mencapai Rp 248.847.918.737 dari target sebesar Rp 278.759.871.305, atau tercapai sebesar 89%.
- Beban Klaim (Ta'widh): Total Beban Klaim pada Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 1.512.827.865 dengan target sebesar Rp 1.550.163.817, atau dengan tingkat pencapaian sebesar 98%.
- Laba Perusahaan: Laba perusahaan pada Triwulan IV terealisasi sebesar Rp 2.602.816.608 dari target sebesar Rp 573.105.942, yang menunjukkan pencapaian sebesar 454%.
- Pendapatan Subrogasi: Pendapatan Subrogasi Syariah terealisasi sebesar Rp 263.439.768 dari target Rp 216.082.260, dengan persentase pencapaian sebesar 122%.
- Indikator Volume:
 1. Terjamin: Terealisasi sebanyak 3.358 orang dari target 2.947 (114%).
 2. Tenaga Kerja: Melindungi 33.015 tenaga kerja dari target 15.620 (211%).
- Aset: Posisi Aset Unit Usaha Syariah tercatat sebesar Rp 70.951.385.086 dari target Rp 78.634.050.115, atau sebesar 90%.

Kejadian Penting

- PKS FLPP & TAPERA UUS sudah mencapai tahap akhir (Review Final). Dokumen telah diserahkan pada 17 November 2025. Langkah selanjutnya yang dinantikan adalah sinkronisasi waktu untuk melakukan pembahasan bersama DUS Bank Kalsel.
- PKS KONSTRUKSI & KBG UUS Status saat ini masih Dalam Proses. Meskipun dokumen sudah diserahkan sejak 21 Juli 2025, terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan isi perjanjian dengan regulasi POJK terbaru. Saat ini, dokumen tersebut sedang dalam proses untuk mendapatkan tanda tangan dari Direktur

Utama (Dirut).

- Berdasarkan keputusan yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 10 September 2029, telah dilakukan perubahan susunan pengurus Perseroan. Perubahan tersebut meliputi pergantian pada jabatan Direktur Utama dan Komisaris Independen. Pergantian ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk memperkuat fungsi pengurusan dan pengawasan Perseroan, serta mendukung peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan strategis perusahaan, khususnya dalam kegiatan usaha penjaminan. Proses pengangkatan dan pemberhentian pengurus telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggapan dan Masukan Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Pengawas Syariah memberikan apresiasi atas pencapaian Unit Usaha Syariah yang sejak awal berdiri hingga saat ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi UUS itu sendiri, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kinerja Perusahaan.
- POJK Nomor 11 Tahun 2025 akan dipelajari lebih lanjut oleh DPS untuk memastikan seluruh ketentuan dapat diimplementasikan dengan baik. Apabila draft PKS sudah tersedia, maka pembahasan tidak hanya difokuskan pada aspek kepatuhan syariah, tetapi juga akan mencakup aspek legalitas agar dokumen tersebut benar-benar memenuhi standar hukum dan syariah.
- DPS memberikan apresiasi atas inisiatif Unit Usaha Syariah dalam menyusun regulasi internal dan prosedur operasional untuk penerapan *One Day Service*. DPS menilai bahwa percepatan layanan ini tetap harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, terutama dalam proses akad, kejelasan dokumen, dan penilaian kelayakan penjaminan. Selama unsur kehati-hatian, transparansi, serta pemenuhan syarat akad terpenuhi, DPS mendukung implementasi layanan cepat ini sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada mitra dan pemohon.
- Rapat membahas data kinerja Unit Usaha Syariah secara rinci dan berurutan sesuai

laporan yang telah disampaikan. Setiap indikator utama dievaluasi satu per satu untuk memastikan akurasi data serta kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan pada Triwulan IV.

- Disampaikan adanya dinamika pada cadangan klaim, baik kenaikan maupun penurunan, yang dipengaruhi oleh:
 - a) Nilai klaim yang dibayarkan.
 - b) Penyesuaian estimasi Cadangan.
 - c) Kenaikan cadangan klaim perlu diantisipasi dengan penguatan manajemen risiko dan pemantauan klaim secara berkala.
- Monitoring data dan cadangan klaim akan dilakukan secara berkala dan lebih mendetail.
- Diperlukan strategi khusus untuk menyikapi produk jiwa yang tidak dapat di-cover kembali.
- Evaluasi dan pengembangan PKS menjadi salah satu fokus utama pada periode berikutnya.

Tanggapan dan Masukan Direksi

Berdasarkan seluruh tanggapan dan masukan dari Dewan Komisaris, Direksi menerima seluruh arahan Dewan Komisaris dan akan segera menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) untuk penyelesaian klaim proyek strategis serta melakukan evaluasi komprehensif terhadap portofolio Bank Kalsel. Laporan progres atas langkah-langkah tersebut akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Dewan Komisaris.

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

PT. Jamkrida Kalsel saat ini sudah memiliki Komisaris Independen

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Memastikan integritas sistem pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal.
2. Mendorong kebijakan perusahaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
3. Memastikan kebijakan anti-fraud dan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) berjalan efektif.
4. Mengawasi efektivitas kinerja Direksi sesuai dengan target KPI yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
5. Memastikan perusahaan patuh terhadap Peraturan OJK (POJK) terbaru, terutama terkait pemenuhan modal minimum dan batasan legal pemberian jaminan.

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

A. Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Dalam rapat tersebut dibahas segala sesuatu yang menyangkut kewenangan Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Rapat Direksi sedapat mungkin dihadiri oleh seluruh Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Selama bulan Januari 2025 s/d Desember 2025, Direksi telah melakukan 36 (Tiga Puluh Enam) kali rapat, diantaranya 4 (Empat) kali rapat bersama Dewan Komisaris dan 30 (Tiga Puluh) Kali rapat bersama pegawai, dengan rata-rata tingkat kehadiran 100%.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Suyanto	36	Ya	100%
2.	Muhammad Hanafiah	36	Ya	100%

B. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dalam rapat tersebut diantaranya mengundang Direksi paling sedikit 4 (empat) kali rapat dan mengundang auditor eksternal paling sedikit 1 (satu) kali rapat. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. Rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil rapat didokumentasikan dengan baik dan penyelenggaraan rapat di laporkan dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik. Selama bulan Januari 2025 s/d Desember 2025, Dewan Komisaris telah melakukan 4 (Empat) kali rapat bersama Direksi, dengan rata-rata tingkat kehadiran 100%.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	M. Syarifuddin	4	Ya	100%
2.	M. Syachriezal Aufa	4	Ya	100%

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS :

- 1) Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing atau
- 2) Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,

Dalam membantu dan memastikan efektivitas system pengendalian internal, terdiri atas :

1. Struktur, keanggotaan dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

1. M Syachriezal Aufa dengan Jabatan Komisaris Independen selaku Ketua Komite Audit
2. Suyanto dengan Jabatan Direktur Utama selaku Anggota Komite Audit 1 (satu)
3. Syaiful Anwar dengan Jabatan Staf Satuan Pengawas Internal selaku Komite Audit 2 (dua)

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara

tertulis.

5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula :

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, culture dan value dari Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan Business Plan dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
6. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan

memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada OJK dan Pemegang Saham.

3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Komite / fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite Audit / fungsi yang membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	M. Syachriezal Aufa	3	100%
2.	Suyanto	3	100%
3.	Syaliful Anwar	3	100%

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

1. Melakukan audit internal sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan.
2. Penyusunan Laporan GCG.
3. Penyusunan laporan Penerapan GCG.
4. Penyusunan SOP Audit.
5. Melakukan review SOP
6. Counterpart dengan auditor eksternal (KAP dan OJK).

5. Struktur Komite lainnya

- Komite Investasi (Anggota Direksi dan Kepala Bagian Investasi)
- Komite Kepatuhan (Anggota Direksi & Kepala Divisi Kepatuhan)
- Komite SDM (Anggota Direksi & Kepala Divisi SDM)
- Komite Risiko (Anggota Direksi & Kepala Bagian Risiko)
- Komite Audit
- Komite Remunerasi & Nominasi
- Komite Klaim
- Komite Penjaminan

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite

- a. Komite Investasi
Memutuskan besaran investasi jangka waktu dan hasil yang akan diperoleh.
- b. Komite Kepatuhan
Melaksanakan pemantauan di dalam pengendalian kepatuhan, kepatuhan tentang pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, selanjutnya tindak lanjut dari hasil pengawasan sampai sejauh mana kepatuhan dilaksanakan, serta penyiapan bahan rekomendasi untuk perbaikan – perbaikan kinerja di dalam proses melaksanakan pekerjaan.
- c. Komite SDM
Mendiskusikan pengambilan keputusan dalam tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan proses nominasi, remunerasi, dan pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan evaluasi.
- d. Komite Risiko
Membantu Direksi dalam pengelolaan Resiko yang dihadapi perusahaan, Komite manajemen risiko merupakan berbagai pendekatan pengelolaan resiko dalam pengaplikasiannya guna meminimalkan dampak resiko terhadap kegiatan perusahaan dan operasional perusahaan.

C. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Fungsi kepatuhan
 - a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Pada PT. Jamkrida Kalsel Anggota Direksi yang ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama.

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Dalam struktur organisasi untuk satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Divisi Kepatuhan yang dibawah langsung oleh Direktur Utama.

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Tugas satuan kerja fungsi kepatuhan

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha PT. Jamkrida Kalsel;
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan *intern* dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai PT. Jamkrida Kalsel mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi PT. Jamkrida Kalsel sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja PT. Jamkrida Kalsel;
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Pengawas Internal/ SPI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit internal terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT. Jamkrida Kalsel;
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi PT. Jamkrida Kalsel, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;

10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha PT. Jamkrida Kalsel; dan
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Gearing Ratio Produktif (maksimal 20 kali)

$$\frac{\text{Nilai penjaminan Produktif}}{\text{Modal sendiri bersih}} = \frac{\text{Rp. 755.266.662.117}}{\text{Rp. 204.427.918.761}} = 3,69$$

Total Gearing Ratio (maksimal 40 kali)

$$\frac{\text{Total nilai penjaminan}}{\text{Modal sendiri bersih}} = \frac{\text{Rp. 2.941.686.903.029}}{\text{Rp. 204.427.918.761}} = 14,39$$

Penjaminan usaha produktif (minimal 25% dari total nilai penjaminan)

$$\frac{\text{Nilai penjaminan Produktif}}{\text{Total nilai penjaminan}} = \frac{\text{Rp. 755.266.662.117}}{\text{Rp. 2.941.686.903.029}} = 25,07\%$$

Current Ratio

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}} = \frac{\text{Rp. 223.902.419.160}}{\text{Rp. 111.121.695.300}} = 201 \%$$

- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

PT. Jamkrida Kalsel melakukan pelayanan konsumen baik secara langsung atau melalui aplikasi portal Perlindungan Konsumen dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang di ajukan konsumen

2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh ruang aspek dan unsur kegiatan.

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit

Meliputi semua aspek manajemen atas kegiatan program yang diperiksa untuk mendapat perhatian, perbaikan dan peningkatan mutu penanganannya.

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki sifat independensi, kebebasan untuk melaksanakan tugas dengan tidak berpihak dan objektif. Dan bertujuan mengusulkan saran perbaikan kepada Direktur Utama.

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Melakukan supervise yang efektif terhadap bisnis dan operasional perusahaan sehingga sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang berlaku guna mendukung pencapaian target perusahaan.

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

PT. Jamkrida Kalsel masih belum memiliki kepala satuan kerja audit internal

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

1 (satu) orang
Nama : Syaiful Anwar
Jabatan : Satuan Pengawas Internal (SPI)

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Dari hasil pelaksanaan pemeriksaan disimpulkan bahwa pada umumnya kegiatan operasional dan kegiatan administrasi keuangan telah berjalan dengan baik dan tidak terdapat Tindakan penyalahgunaan yang dapat merugikan keuangan perusahaan.

3. Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan Keuangan Lembaga Penjamin dengan Standar Audit yang berlaku.

PT. Jamkrida Kalsel telah melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Buku 2022, yang ditunjuk sebagai Kantor Akuntan Publik adalah KAP Gideon Adi Dan Rekan

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran Di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2025	Gideon Adi Dan rekan	KAP Gideon Adi & Rekan STTD.KAP-00004/PM.22/2017	Rp. 45.000.000,-
2023	Gideon Adi Dan rekan	KAP Gideon Adi & Rekan STTD.KAP-00004/PM.22/2017	Rp. 40.000.000,-

2022	Gideon Adi Dan rekan	KAP Gideon Adi & Rekan STTD.KAP-00004/PM.22/2017	Rp. 40.000.000,-
2021	Sandra Pracipta, CPA	KAP Sandra Pracipta, CPA No. STTD.AP-280/NB.122/2018	Rp. 40.000.000,-
2020	Sandra Pracipta, CPA	KAP Sandra Pracipta, CPA No. STTD.AP-280/NB.122/2018	Rp. 37.500.000,-
2019	Drs. Henry & Sugeng	Henry Susanto, 152/NB.122/STTD-AP/2016	Rp. 33.500.000,-
2018	Drs. Henry & Sugeng	Henry Susanto, 152/NB.122/STTD-AP/2016	Rp. 33.500.000,-

D. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO, SYSTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, peraturan, program system dan prosedur di Perusahaan.
- Meningkatkan kesadaran tentang manajemen risiko perusahaan.
- Memberikan laporan kepada Dewan Komisaris terkait hal-hal yang telah diterapkan di perusahaan sesuai tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan.
- Fokus pada penguatan *Gearing Ratio* yang per Desember 2025 mencapai **37,99 kali** (mendekati batas maksimal 40 kali).
- Untuk tahun 2025, disarankan adanya agenda tetap bulanan (bukan hanya triwulanan) antara Direksi dan Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris. Fokus utama rapat ini adalah memberikan arahan strategis terhadap penyelesaian klaim-klaim besar dan memastikan kebijakan penjaminan tetap selaras dengan tingkat kesehatan perusahaan (seperti menjaga *Gearing Ratio* dan *Solvabilitas*).
- Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, Dewan Komisaris dapat melakukan fungsi pengawasan (*oversight*) tanpa harus menunggu laporan formal akhir bulan. Hal ini memungkinkan respons yang lebih cepat jika ditemukan adanya anomali atau pelampauan limit risiko di unit bisnis, sehingga prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tetap terjaga di setiap level pengambilan keputusan.

2. Kecukupan kebijakan, Prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

- PT. Jamkrida Kalsel telah menerapkan teknologi informasi sejak tahun 2014 dan secara berkelanjutan melakukan pengembangan guna mendukung operasional perusahaan. Pengembangan tersebut mencakup sistem informasi bisnis penjaminan, sistem informasi keuangan, sistem operasional, website perusahaan, serta infrastruktur jaringan komputer. Saat ini, Sistem Informasi Bisnis Penjaminan dan Sistem Informasi Keuangan telah terintegrasi dalam satu platform terpadu yang dikenal dengan **SUAK (Sistem Informasi Jamkrida Kalsel)**. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta mempercepat proses bisnis perusahaan. Prosedur analisis penjaminan perlu didukung oleh teknologi yang mampu memberikan rekomendasi keputusan berdasarkan parameter risiko yang telah ditetapkan (misalnya: status zona merah atau riwayat klaim).

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Dalam rangka mengelola risiko pemanfaatan teknologi informasi, PT. Jamkrida Kalsel telah menerapkan mekanisme pengendalian risiko yang memadai, antara lain:

- Melakukan backup data secara otomatis dan periodik
- Menyimpan data cadangan pada cloud storage melalui pemanfaatan Virtual Private Server (VPS)
- Memastikan ketersediaan dan keamanan data sebagai bagian dari mitigasi risiko kehilangan data
- Membuat tim CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) sebagai garda terdepan perlindungan data dan sistem melalui deteksi dini, respon cepat, analisis forensik, serta edukasi keamanan untuk meminimalkan dampak serangan siber.

4. Struktur organisasi sistem informasi

Pengelolaan sistem informasi di PT. Jamkrida Kalsel dilakukan secara terstruktur sesuai dengan fungsi masing-masing divisi, sebagai berikut:

No.	Sistem Informasi	Divisi	Dibawah Direksi
1	Bisnis & Penjaminan	Bisnis & Penjaminan	Direktur Bisnis
2	Klaim & Subrogasi	Klaim & Subrogasi	Direktur Bisnis
3	Pengendalian & MR	Pengendalian, MR & Ristek	Direktur Utama
4	Sekretariat, Analis & Operasional	Sekretariat, Analis & Operasional	Direktur Utama

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

PT. Jamkrida Kalsel telah menetapkan sistem pengendalian internal dalam penggunaan teknologi informasi, yang meliputi:

- Penyusunan Laporan penggunaan sistem informasi yang mudah dipahami oleh seluruh pengguna
- Penerapan hak akses berbasis user (*user access control*) sesuai dengan kewenangan masing-masing
- Pembaruan sistem secara berkala mengikuti SOP, kebijakan, dan peraturan perusahaan terbaru

Laporan penggunaan system informasi penjaminan dan keuangan dibuat agar dapat dengan mudah dipahami. Penggunaan system informasi penjaminan dan keuangan dibatasi wewenangnya berdasarkan hak akses masing-masing user tersebut, serta selalu diupdate sesuai dengan SOP, kebijakan dan peraturan perusahaan terbaru.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Sistem pengendalian internal di PT. Jamkrida Kalsel dilaksanakan secara menyeluruh dan mencakup:

- Penataan struktur organisasi yang jelas dan terukur
- Perlindungan terhadap aset dan kekayaan perusahaan
- Penjaminan keandalan dan kebenaran data akuntansi
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan
- Kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku

Serta meliputi struktur organisasi, menjaga kekayaan perusahaan, memastikan data-data kebenaran akuntansi, mendorong efisiensi perusahaan serta ketaatan atau kebijakan perusahaan yang berlaku. Dengan memperjelas fungsi *Three Lines of Defense*, perusahaan memastikan bahwa unit bisnis sebagai pemilik risiko (*risk owner*) bertanggung jawab langsung pada pengendalian awal, sementara Audit Internal memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) kepada Direktur Utama dan Komisaris bahwa pengendalian tersebut memang berjalan. Ketepatan dalam pelaporan keuangan adalah cerminan dari GCG yang baik. Pengendalian internal yang ketat pada sisi akuntansi akan membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan data keuangan yang akurat dan transparan. Langkah ini mendorong rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap risiko di setiap divisi. Hasil dari *self-assessment* ini menjadi masukan berharga bagi Direksi untuk melakukan perbaikan prosedur secara cepat dan tepat sasaran.

E. PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEGAWAI

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan Fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), Kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

PT. Jamkrida Kalsel memberikan Gaji, Tantiem, Tunjangan Cuti, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Transportasi (bagi yang tidak mendapatkan fasilitas mobil, dalam hal ini adalah komisaris), dan Insentif untuk anggota Direksi.

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

PT. Jamkrida kalsel memberikan fasilitas berupa mobil dinas dan penggantian biaya operasional mobil, pemberian tunjangan purna tugas, dan BPJS.

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
 - a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

PT. Jamkrida Kalsel menyediakan remunerasi dan fasilitas untuk anggota Direksi sebagai berikut :

- Gaji
- Tantiem
- Tunjangan Cuti
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Transportasi
- Insentif
- Mobil dan Biaya Operasional
- Tunjangan Purna Tugas
- BPJS

PT. Jamkrida Kalsel menyediakan remunerasi dan fasilitas untuk anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

- Gaji

- Tantiem
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Transportasi
- Mobil dan Biaya Operasional
- Tunjangan Purna Tugas
- BPJS

b. Remunerasi dan Fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan Jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

No	Jenis Remunerasi	Direksi	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
1	Gaji Salary	Gaji Direktur Utama ditetapkan sesuai keputusan RUPS (Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesejahteraan)	Gaji Komisaris Utama sebesar 47,75% dari gaji Direktur Utama (Gaji Pokok, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Transportasi)	Gaji Ketua Dewan Pengawas Syariah sebesar 39,55% dari gaji Komisaris Utama (Gaji Pokok)
		Gaji Direktur sebesar 90% dari gaji Direktur Utama	Gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama	Gaji Anggota DPS sebesar 90% dari gaji Ketua DPS
2	Fasilitas Natura dan Non-Natura (Dapat Dimiliki)	- Insentif Kinerja Triwulanan* - Jasa Produksi - Tunjangan Hari Raya (THR) - Tunjangan Cuti Tahunan - Tunjangan Cuti Besar - Tunjangan	- Jasa Produksi - Tunjangan Hari Raya (THR) - Tunjangan HUT Perusahaan - Tunjangan Keluarga - Penggantian Biaya Kesehatan (termasuk istri/suami & maksimal 3	- Jasa Produksi - Tunjangan Hari Raya (THR) - Tunjangan HUT Perusahaan - Uang Perjalanan Dinas - Catu Sandang (Tunjangan Pakaian) - Kepesertaan pada Program

		HUT Perusahaan • Tunjangan Keluarga • Tunjangan Akhir Tahun* • Penggantian Biaya Kesehatan (termasuk istri/ suami & maksimal 3 orang anak) • Uang Perjalanan Dinas • Catu Sandang (Tunjangan Pakaian dan Kacamata) • Kepesertaan pada Program BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) • Fasilitas olahraga • Pajak penghasilan atas beban Bank	orang anak) • Uang Perjalanan Dinas • Catu Sandang (Tunjangan Pakaian dan Kacamata) • Kepesertaan pada Program BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) • Fasilitas olahraga • Pajak penghasilan atas beban Bank	BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) • Pajak penghasilan atas beban Bank
3	Fasilitas Lainnya dalam Bentuk Natura (Tidak Dapat Dimiliki)	• Fasilitas mobil dinas (termasuk sopir, perawatan, bahan bakar) • Bantuan hukum • Fasilitas Ruang Kerja dan	• Bantuan hukum • Fasilitas Ruang Kerja dan Penunjang Kerja Lainnya • Dana Representasi	• Bantuan hukum • Fasilitas Ruang Kerja dan Penunjang Kerja Lainnya • Dana Representasi

		Penunjang Kerja Lainnya • Fasilitas Uang Parkir • Dana Representasi		
4	Hak-hak lainnya	• Cuti Tahunan dan Besar • Penghargaan masa kerja setiap akhir masa jabatan	• Penghargaan masa kerja setiap akhir masa jabatan	• Penghargaan masa kerja setiap akhir masa jabatan

Keterangan :

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), Kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.

c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi lainnya dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-	-
Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-	-
Di atas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah) s.d Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	2	-	-
Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah) kebawah	-	2	2

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut :

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

1. Rasio gaji pegawai ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Direksi tentang Penggajian, dengan rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah sampai dengan akhir tahun pelaporan yaitu sebesar 30%.
2. Rasio gaji anggota Direksi :
 - Gaji Direktur Utama ditentukan dengan menggunakan Laporan internal yang ditetapkan oleh RUPS.
 - Direktur menerima gaji sebesar 90% dari gaji yang diterima oleh Direktur Utama
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama menerima gaji sebesar 40% dari gaji yang diterima Direktur Utama
 - Komisaris menerima gaji sebesar 90% dari gaji yang diterima Komisaris Utama
4. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi sampai dengan akhir tahun pelaporan yaitu sebesar 27%

F. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, PT Jamkrida Kalsel melakukan publikasi laporan keuangan tahunan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh KAP/Auditor Eksternal melalui website resmi perusahaan dan kanal digital lainnya, serta tetap memenuhi kewajiban publikasi pada media cetak lokal sesuai ketentuan yang berlaku.

G. RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja

Perusahaan menargetkan penguatan kerja sama strategis dengan Bank Umum Nasional, baik konvensional maupun syariah, melalui proses seleksi mitra yang tepat dan penandatanganan PKS guna mendorong peningkatan volume penjaminan. Selain itu, perusahaan berfokus pada ekspansi jaringan operasional di Kalimantan Selatan melalui pembukaan unit/cabang baru serta penguatan pemasaran produk penjaminan, termasuk pengembangan bisnis di sektor suretyship, penjaminan non-bank, dan kredit program.

Di sisi daya saing, perusahaan diarahkan untuk mampu bersaing dengan lembaga penjaminan dan asuransi berskala nasional melalui peningkatan kualitas layanan dan jangkauan pasar. Upaya ini didukung dengan perluasan jaringan pemasaran di berbagai kabupaten/kota, transformasi digital berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas, serta pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi perusahaan penjaminan syariah yang berdiri sendiri guna memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku.

2. Anggaran tahunan

Rencana anggaran PT Jamkrida Kalsel Tahun 2026 disusun secara komprehensif dengan mengacu pada evaluasi kinerja tahun berjalan (2025), proyeksi pertumbuhan usaha, serta analisis risiko yang terintegrasi. Penyusunan anggaran tidak hanya mempertimbangkan tren historis, tetapi juga memperhatikan arah rencana strategis perusahaan dalam jangka menengah, termasuk ekspansi bisnis, penguatan jaringan pemasaran, serta pengembangan sistem berbasis teknologi. Proses penyusunan dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, melibatkan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal, guna memastikan anggaran yang disusun bersifat prudent, realistis, dan akuntabel. Selain itu, seluruh proses tetap berlaporan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang, POJK, dan regulasi terkait lainnya, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

H. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

Sejak berdiri sampai dengan sekarang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan penjaminan lainnya.

III. PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM LEMBAGA PENJAMIN TEMPAT ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DIMAKSUD MENJABAT

1. Hubungan Keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/ atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

Sejak didirikan sampai dengan sekarang anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/ atau pemegang saham lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

Sejak didirikan sampai dengan sekarang anggota Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

Keterangan:

Hubungan Keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendaliannya adalah anggota Dewan komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung /tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

IV. PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINYA :

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

PT. Jamkrida Kalsel tidak ada menerima pengunduran diri atau melakukan pemberhentian auditor eksternal.

2. Transaksi material dengan pihak terkait

PT. Jamkrida Kalsel tidak melakukan transaksi material dengan pihak terkait.

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin terjadi adalah pembelian asset Lembaga Penjamin oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau pegawai Lembaga Penjamin.

Keterangan :

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

PT. Jamkrida Kalsel tidak ada benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

PT. Jamkrida Kalsel tidak ada informasi material lain mengenai lembaga Penjaminan

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

PT. Jamkrida Kalsel sudah memiliki Komisaris Independen keputusan OJK pertanggal 02 Oktober 2019

6. Sertifikasi

No.	Materi Sertifikasi	Tempat / Tanggal	Penyelenggara
1.	Certified In Risk Governance Professional by LSPMR	- Tangerang, 24 September 2009 - Bogor, 24 Juli 2019 - Batam, 09 November 2017 - Batam, 30 Desember 2015 - Batam, 27 November 2015	PT. RAP Asia Consulting
2	Certified Risk Management Officer	- Jakarta, 31 Oktober 2013	PT. RAP Asia Consulting

7. Tenaga kerja asing

Semua anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pegawai berstatus WNI (Warga Negara Indonesia)

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	0	0	0

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah diselesaikan	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui proses hukum	0	0	0

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap a. b.	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk kasus perdata a. b.	0	0
Total		

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, harus memperhatikan etika baik untuk internal maupun eksternal Perusahaan. Etika merupakan suatu norma moral dan nilai yang menjadi dasar bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika bisnis Perusahaan merupakan penjelasan bagaimana suatu entitas bisnis bersikap beretika dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan kepentingan segenap Stakeholders sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan.

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Memahami hukum dan peraturan yang berlaku di segala aktivitas harus dihayati oleh Insan Perusahaan dalam setiap kegiatan bisnis melalui komitmen sebagai berikut :

1. Seluruh insan perusahaan berkewajiban untuk memahami, mematuhi dan melaksanakan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh perusahaan dan peraturan perundang-undangan secara konsisten.
2. Setiap insan perusahaan harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum dan perundang-undangan.
3. Segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan insan perusahaan terhadap hukum dan perundang-undangan tidak dapat ditolerir dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat ketidakpatuhannya
4. Setiap insan perusahaan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan perusahaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain
5. Mengedepankan penyelesaian dengan jalur musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka digunakan jalur hukum dan menghormati proses hukum dan keputusan yang dihasilkan.

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (Stakeholders), maka seluruh Insan Perusahaan memiliki komitmen untuk:

1. Berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan

Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan.

2. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.
3. Peduli dan tanggap terhadap keluhan/masukan dan segera menindaklanjutinya.
4. Membuat rencana kerja dengan baik sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
5. Memahami sasaran kerja beserta ukuran keberhasilannya.
6. Bekerja keras, dan berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien.
7. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan.
8. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai Budaya Perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan reputasi Perusahaan.

Adapun arahan yang menjadi acuan seluruh insan perusahaan antara lain adalah :

1. Pahami Kebijakan Etika Bisnis:

Mulailah dengan mempelajari secara menyeluruh kebijakan etika bisnis yang diterapkan oleh PT Jamkrida Kalsel. Biasanya, lembaga akan memiliki dokumen resmi yang menjelaskan nilai-nilai etika, standar perilaku, dan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

2. Ikuti Laporan dan Standar:

Pastikan Anda memahami dan mengikuti Laporan serta standar etika yang ditetapkan oleh PT Jamkrida Kalsel. Ini dapat mencakup Laporan tentang konflik kepentingan, tata kelola perusahaan, perlindungan data, dan prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab.

3. Perhatikan Integritas dan Keadilan:

Penting untuk selalu bertindak dengan integritas dalam setiap aspek pekerjaan Anda. Jaga agar keputusan dan tindakan Anda selalu adil, jujur, dan transparan.

4. Lindungi Keamanan Informasi:

Pastikan Anda memahami kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk melindungi

keamanan informasi dan data penting pelanggan serta perusahaan. Ini termasuk penggunaan sistem keamanan informasi yang tepat dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data yang berlaku.

5. Berperan Aktif dalam Tanggung Jawab Sosial:

Selain fokus pada keuntungan perusahaan, penting bagi Anda untuk terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan oleh PT Jamkrida Kalsel. Ini bisa berupa kontribusi pada pembangunan sosial, lingkungan, atau mendukung program-program kesejahteraan masyarakat.

6. Berkomunikasi dan Berkolaborasi:

Selalu jalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi yang baik akan membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam praktik bisnis yang sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang dipegang oleh PT Jamkrida Kalsel.

7. Peningkatan Diri dan Pembelajaran Berkelanjutan:

Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda dalam hal etika bisnis dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Ini bisa melalui pelatihan, kursus, atau membaca literatur terkait.

Menyetujui



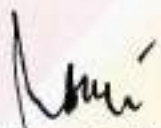
Muhammad Hanafiah
Direktur Bisnis

RENCANA TINDAKAN (ACTION PLAN)

NO	TINDAKAN KOREKTIF	TARGET PENYELESAIAN	KENDALA PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Kerjasama Penjaminan dengan BSI	TW III Tahun 2026	Penguatan PKS wilayah Kalimantan Selatan untuk penjaminan produktif	-
2.	Ekspansi Bisnis Skim Produktif BPR / BPRS di Kalsel yang Sudah Kerjasama	TW II & TW III Tahun 2026	Penyusunan penyesuaian terhadap POJK 11 untuk klausul PKS, penentuan struktur IUP, dan koordinasi teknis operasional dengan perbankan.	
3.	Kerjasama Penjaminan dengan BPR/BPRS serta Koperasi di Kalsel baru	TW II - TW IV Tahun 2026	Peninjauan kinerja BPR/BPRS sehat sesuai POJK 11/2025.	
4.	Kerjasama Co-Guarantee dengan Jamkrida Jakarta dan Jamkrindo	TW II & TW III Tahun 2026	Tahap penjajakan	
5.	Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) PT Jamkrida Kalsel	Akhir Tahun 2026 - 2029	Proses yang rinci dan detail dalam tenggang waktu	
6.	Pengendalian klaim & penguatan manajemen risiko	TW I & TW II Tahun 2026	Tingginya beban klaim (terutama konstruksi/surety)	
7.	Digitalisasi proses bisnis	TW II & TW III Tahun 2026	Integrasi sistem dengan mitra belum optimal	
8.	Optimalisasi laba melalui	TW I – TW IV Tahun 2026	Sulitnya penagihan piutang subrogasi &	

	subrogasi & investasi		Pendapatan investasi belum optimal	
9.	Program peningkatan budaya kerja & profesionalisme	Berkala	Adaptasi terhadap perubahan organisasi & Kompetensi SDM belum merata	
10.	Penguatan keamanan data & sistem IT	TW 2 – TW 3 Tahun 2026	Risiko keamanan data & serangan siber	

Menyetujui



Muhammad Syarifuddin
Komisaris Utama



Muhammad Hanafiah
Direktur Bisnis

JAMKRIDA
KALAMATI